

# **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN DESA**

(Studi Pada Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**MUHAMMAD FANDI FAUZI**  
**NIM. 135030607111001**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**MALANG**  
**2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Membangun Desa (Studi pada Desa  
Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)  
Disusun oleh : Muhammad Fandi Fauzi  
NIM : 135030607111001  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Administrasi Publik  
Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang, 3 Desember 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



**Dr. Sarwono, M.Si.**  
**NIP. 19570909 198403 1 002**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

hari : Kamis  
tanggal : 20 Desember 2018  
jam : 08.00-09.00 WIB  
skripsi atas nama : Muhammad Fandi Fauzi  
judul : Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Membangun Desa (Studi Pada Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)

**dan dinyatakan LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua,



**Dr. Sarwono, M.Si**  
**NIP. 19570909 198403 1 002**

Anggota,



**Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si**  
**NIP. 19730713 200604 1 001**

Anggota,



**Dr. Bambang Santoso Harvono, MS**  
**NIP. 19610204 198601 1 001**

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Membangun Desa (Studi pada Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 5 Desember 2018



**Muhammad Fandi Fauzi**  
**NIM. 135030607111001**

**CURRICULUM VITAE****A. Identitas Diri**

Nama : Muhammad Fandi Fauzi

NIM : 135030607111001

Tempat, Tanggal Lahir : Bontang, 27 April 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Jl. D.Semayang No. 124 Sangatta Utara, Kutai Timur

Alamat domisili : Jl. Terusan Piranha Atas Blok B No.7, Malang

No. Telepon : 082132359039

Email : muhammadfandifauzi@yahoo.com

**B. Riwayat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK	TK YPPSB	2000-2001
2	SD	SD YPPSB	2001-2007
3	SMP	SMP YPPSB	2007-2010
4	SMA	SMAK Diponegoro	2010-2013
5	S1	Universitas Brawijaya	2013-2017

**C. Pengalaman Berorganisasi**

No	Posisi	Organisasi	Tahun
1	Anggota	SEC FIA UB	2013-2014

*Karya sederhana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,  
Ibu dan Ayah yang dengan sabar menuntun anaknya hingga saat ini dan  
tiada hentinya memberikan dukungan dengan kasih sayang tulus, serta  
memanjatkan do'a disetiap langkah perjalanan anaknya.....*



## RINGKASAN

Muhammad Fandi Fauzi, 2018, **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Membangun Desa (Studi Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)**. Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Sarwono, M.Si

---

Penelitian ini dilakukan atas dasar terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah yang tidak diimbangi prinsip keadilan dan demokratis. Kondisi tidak meratanya pembangunan kemudian memunculkan sebuah konsep baru untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat. Berbagai program pemberdayaan silih berganti sejak rezim Soeharto hingga masa kini. Beberapa program secara riil belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat desa. Untuk itu perlu adanya upaya untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran sehingga dapat menciptakan desa yang memiliki potensi dan mampu meningkatkan kapasitas masyarakatnya sendiri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan peneliti mengacu pada metode Creswell.

Hasil penelitian menyatakan bahwa terjadinya pemberdayaan masyarakat di Desa Sepaso Selatan hanya berada di batas penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan untuk pengambilan keputusan masih diputuskan oleh Pemerintah Desa. Faktor Sumber Daya Manusia menjadikan kapasitas masyarakat Desa Sepaso Selatan tidak mampu bertindak jauh dalam kegiatan pembangunan desa. Seharusnya menjadikan masyarakat sebagai rekan kerja merupakan cara untuk memberdayakan desa kearah pembaharuan. Ada dua alternatif yang mampu dilakukan Desa Sepaso Selatan, yaitu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan keterlibatan perguruan tinggi atau pihak swasta. Dukungan aktif masyarakat Desa Sepaso Selatan Sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tiap masyarakatnya. Ditunjang dengan keterlibatan akademisi dan pihak swasta yang menjadi pelopor untuk bekerjasama melalui perjanjian kerjasama maupun bentuk kegiatan lainnya.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan, Desa



## SUMMARY

Muhammad Fandi Fauzi, 2018, **Community Empowerment as an Effort to Develop a Village (Research in Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)**. Development Planning Interest. Public Administration Studies. Faculty of Administration Science. Brawijaya University, Malang. Lecturer: Dr. Sarwono, M.Si

---

This research based on region development inequality that not in line with the principle of justice and democratic. Uneven condition about development in some region issued a new concept to develop a village through community empowerment. There are some community empowerment programs since Soeharto regime. Some of them have not been able to make a significant impact on poverty alleviation and village society abandonment. Therefore, it is needed to find out about how this program is carried out like what are its goals, principles, and objectives so it can build a village that have a potential and ability to improve its community capacity.

Research type that used for this undergraduate thesis is descriptive research with qualitative method. The data sources use primary data and secondary data. Data analysis refers to Creswell method.

The result of this research stated that community empowerment in Desa Sepaso Selatan only at the limit of aspiration disclosure from community and the decision making is still decided by the village government. Human factor makes community in Desa Sepaso Selatan doesn't have a capacity to act more in village development activities. Meanwhile, it supposed to invite the community as co-worker to empower the village towards renewal. There are two alternatives that able to do in Desa Sepaso Selatan, it's the empowerment of community institution and the involvement of universities or private party. Active support from Desa Sepaso Selatan community in every development activity is needed to improve the capacity of its community. Supported by the involvement of academic expert and private parties, and they became pioneers to work together through cooperation agreements and other forms of activities.

**Keywords:** Community Empowerment, Development, Village



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa belajarnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Desa Tertinggal (Studi Pada Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur)**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi isyarat dalam memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Sarwono, M.Si selaku ketua pembimbing yang telah meluangkan waktu dan arahnya demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya, Mama Omi dan Bapak Edi atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas sejak penulis kecil yang selalu memberikan doa, serta dukungan, moril, arahan, dan juga motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Seluruh pegawai Kantor Desa Sepaso Selatan dan Masyarakat Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon atas bantuan dan kerjasamanya dalam pemberian informasi dan data-data yang dibutuhkan terkait dengan tema skripsi yang penulis ambil.
7. Partner terbaik saya Bidherine Eppy Putri Aen Ryel yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku Uno Muncrat (Dwi Suryaningsih, Dewi Wahyuni, Jumerliyanti Mase, Chrsitine Eka W.H, Deby Chriswanty, Yogi Suwandy, Yobel Leonardo T), sahabat-sahabatku kontrakan “Musafir” (Yoga Nade, Gita, Yogi, Tobel)
9. Sahabat-sahabatku FIA 2013 Perencanaan Pembangunan, Sukses Skripsi dan seperjuangan (Renaldo Akbar Paradi, Geo Lambang Agape, Roberto Albertinus, Muhammad Luthfi, Muhammad Rezky Ramadhan) yang terus memberikan dukungan kepada saya.
10. Seluruh teman-teman FIA angkatan 2013, teman-teman Jurusan Administrasi Publik angkatan 2013, teman-teman Minat Perencanaan Pembangunan angkatan 2013 atas kebersamaannya selama ini dan bantuan yang berarti bagi penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 20 Desember 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY. ....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN. ....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	14

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Administrasi Publik.....	16
1. Pengertian Administrasi .....	16
2. Pengertian Administrasi Publik.....	17
B. Adminsitasi Pembangunan .....	20

1. Pengertian Administrasi Pembangunan .....	20
2. Fungsi Administrasi Pembangunan .....	21
C. Teori Pilihan Publik .....	23
D. Desa dan Pembangunan Desa .....	25
1. Pengertian Desa .....	25
2. Pemerintahan Desa .....	27
3. Otonomi Desa .....	30
4. Pembangunan Desa .....	31
5. Prinsip Pembangunan Desa .....	32
6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa .....	34
E. Pemberdayaan Masyarakat .....	35
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	35
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat .....	38
3. Proses Pemberdayaan Masyarakat .....	40
4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat .....	41
5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat .....	43

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Fokus Penelitian .....	49
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	50
D. Sumber dan Jenis Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	53
F. Instrumen Penelitian .....	56
G. Metode Analisis Data .....	57

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi dan Penelitian .....	61
1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur .....	61

a. Sejarah Singkat Kabupaten Kutai Timur .....	61
b. Kondisi Geografis .....	64
c. Demografi .....	67
d. Sosial Ekonomi .....	69
e. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur 2006-2025 .....	71
2. Gambaran Umum Desa Sepaso Selatan .....	73
a. Sejarah Singkat Desa Sepaso Selatan .....	73
b. Kondisi Geografis .....	75
c. Demografi .....	76
d. Pendidikan .....	77
e. Kondisi Sosial Ekonomi .....	78
f. Sarana dan Prasarana .....	79
B. Penyajian Data.....	80
1. Dinamika Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di desa Sepaso Selatan yang meliputi .....	80
a. Cara Desa dalam Merencanakan.....	82
b. Cara Desa dalam Implementasi .....	85
c. Cara Desa dalam Evaluasi .....	86
2. Tantangan yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa sepaso selatan yang meliputi .....	88
a. Faktor Pendukung .....	88
1) Potensi Wilayah .....	88
b. Faktor Penghambat .....	91
1) Keterbatasan Dana .....	91
2) Partisipasi Masyarakat .....	93
3) Kualitas Sumber Daya Manusia.....	93
3. Alternatif pemberdayaan masyarakat desa sepaso selatan ke depan meliputi.....	95
a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan .....	95

b. Melibatkan Pihak Ketiga...	98
C. Pembahasan.....	100
1. Dinamika Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di desa Sepaso Selatan yang meliputi .....	100
a. Cara Desa dalam Merencanakan.....	100
b. Cara Desa dalam Implementasi .....	102
c. Cara Desa dalam Evaluasi .....	102
2. Tantangan yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa sepaso selatan yang meliputi .....	103
a. Faktor Pendukung .....	103
1) Potensi Wilayah .....	103
b. Faktor Penghambat .....	104
1) Keterbatasan Dana .....	104
2) Partisipasi Masyarakat .....	105
3) Kualitas Sumber Daya Manusia.....	106
3. Alternatif pemberdayaan masyarakat desa sepaso selatan ke depan meliputi.....	107
a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan .....	107
b. Melibatkan Pihak ketiga.. .....	110
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran.....	116
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	<b>121</b>

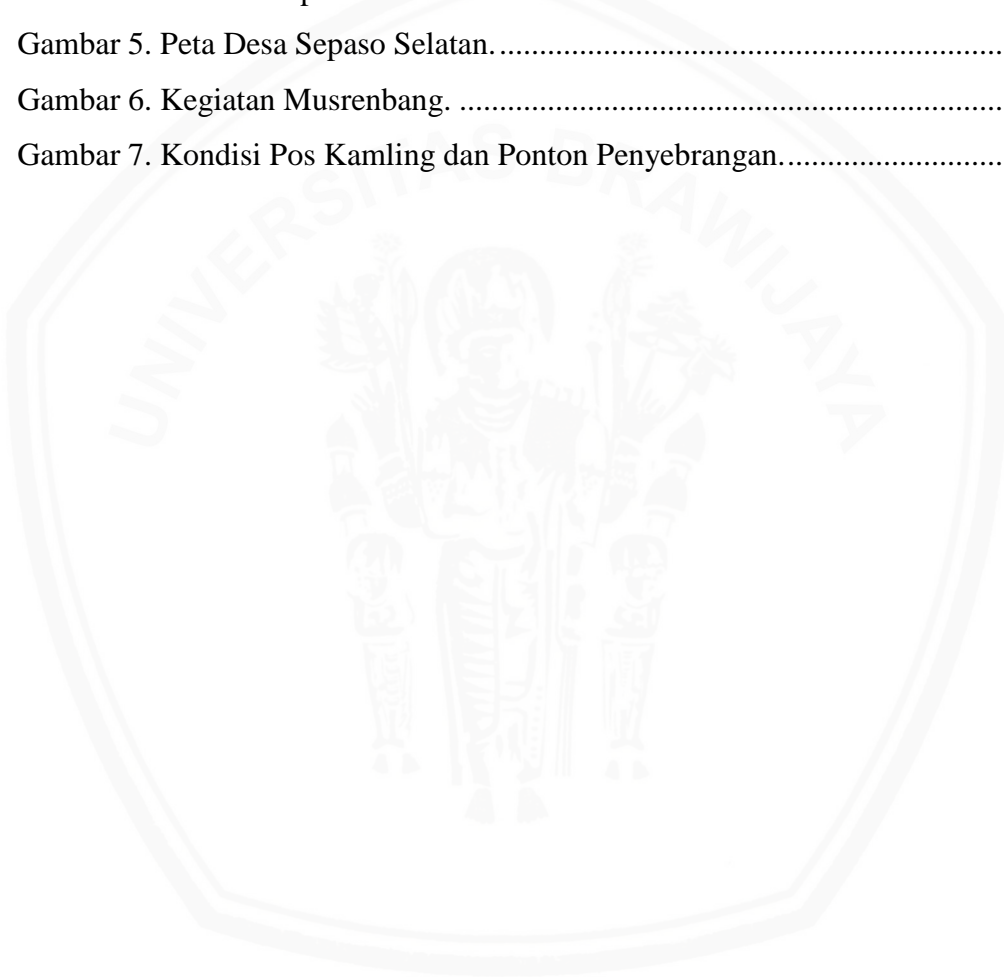
## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
Tabel 1.	Jumlah Desa Tertinggal Di Indonesia .....	3
Tabel 2.	Pemetaan Pemberdayaan.....	9
Tabel 3.	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur...	66
Tabel 4.	Persebaran Jumlah Penduduk pada Setiap Kecamatan .....	67
Tabel.5.	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan .....	68
Tabel.6.	Jumlah penduduk dan Presentasi Penduduk Miskin .....	69
Tabel.7.	Penggunaan Lahan .....	75
Tabel.8.	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	75
Tabel.9.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama.....	77
Tabel.10.	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	77
Tabel.11.	Prasarana Pendidikan Desa. ....	78
Tabel 12.	Luas Wilayah Kecamatan Bengalon. ....	88
Tabel 13.	Luas Lahan Menurut Penggunaannya.....	88
Tabel 14.	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija.	89
Tabel 15.	Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	94



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
Gambar 1.	<i>The Ladder of Citizen Participation</i> .....	45
Gambar 2.	Komponen Analisis Data Model Creswell.....	57
Gambar 3.	Lambang Kabupaten Kutai Timur.....	61
Gambar 4.	Peta Kabupaten Kutai Timur.....	63
Gambar 5.	Peta Desa Sepaso Selatan.....	74
Gambar 6.	Kegiatan Musrenbang. ....	84
Gambar 7.	Kondisi Pos Kamling dan Ponton Penyebrangan.....	86



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan bangsa dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaan pembangunan nasional perlu mengacu pada kepribadian bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, maju, sejahtera dan beretika. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alenia ke-4. Pembangunan yang terpusat dan tidak merata mulai dilakukan pada masa lalu yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah, karena tidak diimbangi prinsip keadilan dan demokratis yang menyelimuti aspek sosial, politik dan ekonomi.

Ketimpangan pembangunan ditandai dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan pedesaan, dan tingginya ketergantungan kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung dan pemasaran hasil produksi di pedesaan (Sumarmi, 2012). Ketimpangan pembangunan di Indonesia pada dasarnya disebabkan karena pada pelaksanaannya kurang

memperhatikan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan, yang semestinya menjadi subjek dari sebuah pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan kurang memberikan perhatian dan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap prosesnya, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembangunan sampai evaluasi pembangunan.

Ketimpangan pembangunan akan berdampak langsung pada kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Maka hendaknya pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan yang berkesinambungan dan dapat dimulai dari tingkat bawah seperti desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Berdasarkan sumber data Badan Pusat Statistik Nasional yang terdapat di dalam Perka BPS No. 66 Tahun 2016 Tentang Kode dan Data Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016, jumlah desa seluruhnya di Indonesia mencapai sekitar 82.038 desa. Perbedaan lokasi menyebabkan potensi di berbagai desa seluruh Indonesia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kebijakan yang akan dibuat harus sesuai dengan tipologi desa masing-masing.

Tipologi menggambarkan ciri-ciri, potensi dan kondisi sumber daya (alam, manusia, dan buatan) yang dimiliki desa, yang dikaitkan dengan aspek topografi, kegiatan ekonomi daerah dan kemampuan keswadayaan masyarakat sehingga

dijadikan sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan secara nasional (Adisasmita, 2013). Sejak berlakunya otonomi daerah, desa memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, Pemerintah Desa juga memiliki kebebasan untuk mengelola pembangunan desa sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki desa. Namun dalam pelaksanaannya, kondisi desa masih identik dengan ketertinggalan dan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan belum terpenuhinya aspek kebutuhan sosial dasar, infrastuktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan data tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, jumlah desa tertinggal di Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Desa Tertinggal Di Indonesia**

No.	Wilayah Pulau	Jumlah Desa Tertinggal	%
1	Sumatera	12.482	56,59%
2	Jawa	15.087	67,18%
3	Kalimantan	3.063	47,99%
4	Sulawesi	4.398	53,42%
5	Nusa tenggara & Bali	2.277	63,27%
6	Maluku	782	39,94%
7	Papua	1.002	19,25%
<b>Total</b>		<b>39.091</b>	<b>52,79%</b>

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi, 2015

Berdasarkan tabel 1 bahwa sebanyak 39.091 desa adalah desa tertinggal yang tersebar di berbagai pulau besar di Indonesia. Desa tertinggal adalah daerah yang relatif kurang berkembang dari segi perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana, kemampuan keuangan lokal, akuntabilitas dan karakteristik daerah, dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan berpenduduk yang relatif tertinggal. Dalam Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria: a) perekonomian masyarakat; b) sumber daya manusia; c) sarana dan prasarana; d) kemampuan keuangan daerah; e) aksesibilitas; dan f) karakteristik daerah. Umumnya kondisi desa masih diselimuti kemiskinan dan ketertinggalan, oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melakukan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan antara wilayah desa dan kota, sebagai akibat dari pembangunan yang lebih maju di perkotaan. Pembangunan desa mengutamakan pada aspek kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat, dilakukan secara terpadu sebagai upaya peningkatan ekonomi desa sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan sejahtera (Adisasmita, 2006). Pembangunan desa dapat diwujudkan dalam suatu program ataupun kegiatan yang fokus pada kebutuhan masyarakat, melalui pendekatan pembangunan desa yang bersifat *bottom-up* dan diperkuat dengan pendekatan partisipatif. Prioritas pembangunan pedesaan meliputi: a) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemeritahan desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan; b)

pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya; c) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa; d) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa; e) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan; f) pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota; g) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan (Bappenas, 2015). Pembangunan desa diharapkan menjadi solusi perubahan masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai tempat yang menarik untuk tempat tinggal dan mencari penghidupan.

Kondisi ini kemudian memunculkan sebuah konsep baru untuk membangun desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menggali dan memanfaatkan potensi daerah tersebut. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan baru dan penumbuhan daya saing. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,

kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Kekuatan ini meliputi langkah nyata meliputi peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber ekonomi seperti modal, teknologi, lapangan kerja dan pasar. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan inividu masyarakat, tetapi juga dapat menanamkan nilai-nilai budaya *modern* seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan tanggung jawab. Aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan, dibangun dari sumber daya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara keberlanjutan (Mardikanto dan Soebiato, 2017).

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, dan menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Dilihat dari sejarahnya konsep pemberdayaan masyarakat sejatinya telah dimulai sejak pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru, pemerintah meluncurkan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan. Program IDT menyangkut kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di desa-desa tertinggal, melalui pengembangan sumberdaya ekonomi di pedesaan, *supply* kebutuhan dasar, pelayanan jasa, dan penciptaan lingkungan pendukung bagi proses pengentasan kemiskinan. Program IDT, selain memberikan dukungan dana 20 juta per



desa tertinggal, juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, supervisi dan tenaga pendamping. Lebih dari itu, program IDT juga membantu mengembangkan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi pedesaan.

Program IDT didasarkan pada prinsip pembangunan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan baik perorangan, keluarga maupun kelompok dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong penduduk miskin meningkatkan kemandirian dan membebaskan dirinya sendiri dan keluarganya dari kemiskinan. Walaupun demikian program IDT adalah program yang sifatnya *top down*, yang memperlakukan masyarakat miskin sebagai objek dan masyarakat belum sepenuhnya terlibat menjadi pelaku pembangunan. Oleh karena itu, program IDT tidak menjadikan masyarakat menjadi responsif karena sebagian beranggapan bahwa program yang diluncurkan semata mata bukan untuk kepentingan kelompok miskin tetapi karena kepentingan aparat pemerintah, karena keterlibatan masyarakat miskin dinilai masih kurang. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin juga sering dimaknai sebagai upaya membagi-bagi rejeki untuk masyarakat miskin, oleh sebab itu tidak mengherankan apabila sasaran program tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan (Bappenas, 2013).

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diresmikan suatu program bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dengan tujuan meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2007 dimulai dengan Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) sebagai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik (Bappenas, 2013). PNPM Mandiri adalah program nasional yang berwujud kerangka kebijakan untuk menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Program-program tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat menuju kemandiriannya dalam pembangunan diri, oleh dan untuk masyarakat yang didesain sedemikian rupa sesuai dengan otonomi daerah. Program ini dilaksanakan melalui sinkronisasi dan pengembangan sistem, mekanisme, dan prosedur program, penyediaan pendampingan, serta dana stimulan per tahun.

PNPM Mandiri memiliki ciri yang berbeda dengan program penanggulangan kemiskinan yang lain, yang terdapat pada tiga ciri utama dari program tersebut adalah partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan pemberian BLM. Kemudian kepada masa pemerintahan Jokowi, dikeluarkan salah satu program yaitu dana desa, merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa adalah belanja pemerintah pusat yang direalokasikan langsung ke desa terkait sistem penyediaan administrasi umum pedesaan serta proyek infrastruktur dasar yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan diharapkan agar desa-desa dapat lebih mandiri dan mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional. Secara

bertahap, 1.138 desa di perbatasan dan 39.089 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal yang akan menerima bantuan tersebut. Jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat setiap tahunnya, yang dimulai dari tahun 2015-2017 sebesar Rp 20 triliun menjadi Rp 47 triliun dan kini berada pada angka Rp 60 triliun (www.presiden.go.id).

Dari gambaran historis ini, ditemukan 3 aspek pemetaan tentang pemberdayaan yang selama ini dilakukan.

**Tabel 2. Pemetaan Pemberdayaan**

<b>Rezim Soeharto</b>	<b>Rezim Susilo Bambang Yudhoyono</b>	<b>Rezim Joko Widodo</b>
<i>Top Down</i>	<i>Top Down</i>	<b>Totalitas Masyarakat</b>
Memperlakukan masyarakat desa sebagai objek, karena masyarakat tidak memahami betul manfaat dan perannya mulai dari tahap perumusan sampai evaluasi dalam pembangunan. Selain itu masyarakat dinilai tidak memiliki kemampuan dalam perencanaan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya terlibat menjadi pelaku pembangunan.	Pada tahap Implementasi telah melibatkan orang ketiga, yakni tenaga ahli yang diharapkan mampu melakukan tugasnya sebagai fasilitator untuk mensinkronisasi apa yang menjadi keinginan desa dan pemerintah pusat.	Pemberian dana langsung ke desa. Diharapkan masyarakat mampu merumuskan perencanaan, mengimplementasi, mengevaluasi, dan menikmati hasilnya sendiri. Desa sudah memutuskan untuk mengelola sendiri di segala aspek.

Sumber: Bappenas, 2015

Berdasarkan tabel 2 pemberdayaan yang selama ini dilakukan memiliki tujuan yang sama namun dengan pendekatan yang berbeda. Program pemberdayaan yang

telah di keluarkan mulai dari rezim Soeharto hingga saat ini pada rezim Joko Widodo, pada kenyataannya belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat desa. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya desa tertinggal di Indonesia. Salah satu kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pembangunannya adalah Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur sendiri masih perlu melakukan pemerataan pembangunan di berbagai desanya.

Hal tersebut karena masih banyaknya desa tertinggal yang pembangunannya masih sangat minim, dengan 23 desa masih berstatus desa tertinggal dari jumlah 133 desa di Kabupaten Kutai Timur. Salah satu desa yang masih dalam tingkatan desa tertinggal, yaitu Desa Sepaso Selatan. Desa Sepaso Selatan terletak di Kecamatan Bengalon yang terdiri dari 8 RT. Dengan luas wilayah 17.0 km<sup>2</sup>, memiliki jumlah penduduk laki-laki 1260 jiwa, perempuan 988 jiwa dengan keluarga sebanyak 526 KK. Desa Sepaso Selatan telah menjadi desa tertinggal sejak berlakunya pemekaran Desa Sepaso pada tahun 2002.

Kebutuhan mendasar manusia yakni listrik hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat. Hanya 398 KK yang sudah menggunakan listrik dan 128 KK belum menggunakan listrik. Sementara itu di lingkungan desa Sepaso Selatan tidak ada jalan utama desa. Dalam hal sanitasi pun masih kurang layak, karena sebagian besar warga desa tempat untuk buang air besar masih pada jamban yang dimiliki sendiri. Sedangkan tempat pembuangan sampah sebagian besar warga dilakukan di sungai, saluran irigasi

atau laut, karena tidak memiliki tempat pembuangan sementara (TPS), dan juga ketersediaan prasarana transportasi dan komunikasi yang kurang memadai.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Desa Sepaso Selatan termasuk kategori desa tertinggal. Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menjawab permasalahan ketertinggalan pembangunan yang terjadi di Desa Sepaso Selatan. Pemberdayaan masyarakat yakni memanfaatkan potensi desa yang berupa pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kemajuan dalam pembangunan dan perekonomian. Desa Sepaso Selatan mempunyai keunggulan dalam sektor pertanian dengan jenis komoditi unggulan padi. Peran dan potensi masyarakat dalam mengembangkan sektor pertanian perlu upaya pemberdayaan masyarakat yang tepat untuk menciptakan kemajuan desa.

Kemajuan desa yakni berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa agar bisa mengembangkan potensi dan kemampuan masyarakat, dapat meliputi antara lain dengan bertani, berternak, melakukan wirausaha atau keterampilan-keterampilan *home industry* (rumah industri) dan masih banyak lagi kemampuan dan keterampilan masyarakat yang dapat dikembangkan. Namun, pemberdayaan yang selama ini yang dilakukan oleh pemerintah kurang optimal melibatkan masyarakat mulai dari perumusan perencanaan sampai evaluasi pembangunan didesa. Karena tanpa disadari, sebenarnya peran pemerintah sendiri masih lebih besar, meskipun tidak secara fisik akan tetapi dalam wujud regulasi kurang memberikan keleluasaan bagi masyarakat secara optimal.

Pemberdayaan masyarakat di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk semua desa. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Sepaso Selatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Tata kelola pemberdayaan masyarakat masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa. Pemberdayaan masyarakat desa yang saat ini dilakukan berupa program dana desa dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu dalam memenuhi segala aspek kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu juga, sisi menarik dari dilakukannya program dana desa di Desa Sepaso Selatan yaitu untuk mengetahui apakah program ini berjalan dengan maksimal seperti apa yang menjadi tujuan, prinsip, dan sasaran sehingga dapat menciptakan desa yang tidak tertinggal atau desa yang berdaya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Membangun Desa di Desa Sepaso Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Sepaso Selatan?
2. Apa sajakah tantangan yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Sepaso Selatan?
3. Bagaimana alternatif pemberdayaan masyarakat Desa Sepaso Selatan ke depan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah berusaha untuk menjawab perumusan masalah yang telah sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sepaso Selatan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tantangan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Desa Sepaso Selatan.
3. Untuk mendeskripsikan dan memberikan alternatif pemberdayaan masyarakat di Desa Sepaso Selatan kedepan.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilaksanakan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat akademis karena bermaksud menyumbang pemahaman ilmiah mengenai pemberdayaan masyarakat di desa Sepaso Selatan sebagai upaya pembangunan desa tertinggal.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi berbagai pihak. Bagi peneliti sendiri dan mahasiswa lainnya, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penerapan pemberdayaan masyarakat di desa Sepaso Selatan sebagai upaya pembangunan desa tertinggal. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi desa Sepaso Selatan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti menyusun skripsi ini dalam lima pokok bahasan berdasarkan suatu sistematika yang seluruhnya merupakan satu kesatuan, agar memperjelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian pendahuluan yang mengantarkan pembaca untuk memahami latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka memberikan pandangan dan landasan berpikir bagi pembaca melalui dua hal yaitu, tinjauan empiris yang berisi penelitian terdahulu, dan tinjauan teoritis yang berisi teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti, termasuk di dalamnya jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, skala pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan gambaran umum tempat penelitian, gambaran umum responden, penyajian data yang meliputi pengumpulan data, analisa data dan interpretasi data.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab sebelumnya, disertai dengan saran-saran dari peneliti yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administasi

Secara etimologi administrasi berasal dari bahasa latin (Yunani) yang terdiri atas dua (2) kata, yaitu “*ad*” dan “*ministrate*” yang berarti *to serve* yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Definisi dari administrasi menurut Siagian (2005) merupakan sebuah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Berkembangnya administrasi sebagai cabang ilmu tersendiri, pengertian administrasi juga turut berkembang dengan mengikuti perkembangan zaman. Administrasi merupakan sebuah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Maka dapat dipahami bahwa untuk mencapai tujuan administrasi dengan hasil yang baik diperlukan unsur-unsur yang melekat seperti efisien, efektif dan rasional.

Adminitrasi merupakan sebuah proses pelayanan yang diberikan terhadap manusia. Administrasi akan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Administrasi salah satu perkembangan yang dinamis dalam administrasi dan sangat diperlukan dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini untuk

memudahkan pelaku perubahan dalam menjalankan target yang akan dicapai di masa mendatang. Jika dalam perencanaan pembangunan tidak diimbangi dengan proses administrasi yang baik maka akan menyulitkan para pelaku perencanaan sehingga target perubahan ke arah yang lebih baik tidak dapat dicapai dengan maksimal. Semakin baik pelibatan administrasi yang baik maka akan semakin baik hasil yang akan didapat.

## 2. Pengertian Adminsitrase Publik

Administrasi Publik menurut Keban dalam Pasolong (2012) adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2012) menjelaskan bahwa administrasi publik adalah seni dan ilmu (*art and science*) yang digunakan untuk mengatur "*public affairs*" dan melaksanakan tugas yang ditentukan. Administrasi publik sebagai disiplin ilmu juga bertujuan untuk memecahkan masalah publik terutama dalam bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.

Menurut Keban (2004) administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar

sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik. Melihat berbagai definisi dari administrasi publik dapat disimpulkan bahwa administrasi publik digunakan untuk memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responabilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial dalam melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien, dan rasional. Administrasi publik dalam suatu Negara berperan sebagai suatu hal yang sangat vital dalam menciptakan demokrasi serta sebagai upaya dalam memberdayakan masyarakat.

Administrasi publik sebagai ilmu yang berkembang, memiliki fungsi dalam pelaksanaannya. Menurut Tjokroamidjojo dalam Tjiptoherijanto dan Manurung (2010) ada tiga fungsi administrasi publik, diantaranya adalah:

- a. Formulasi atau perumusan kebijakan  
Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan.
- b. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi  
Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola adalah (struktur) organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut.
- c. Penggunaan dinamika administrasi  
Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa administrasi publik adalah proses kerjasama yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga publik yang mana berhubungan dengan masyarakat dan kepentingan politik dalam ranah

pemerintahan. Administrasi publik bukan hanya suatu ilmu namun juga diartikan sebagai suatu seni dalam mengatur dan melaksanakan tugas pemerintahan. Tugas dari administrasi publik sendiri terdapat pada fungsi, diantaranya adalah merumuskan kebijakan, mengatur unsur-unsur administrasi dan menggunakan dinamika administrasi.

Selain itu Klingner dan Nalbandian (1985) mengungkapkan bahwa ada empat nilai yang dimiliki administrasi Negara (publik). Keempat nilai yang dapat juga dikatakan merupakan pendekatan tersebut mencakup *administrative efficiency* (efisiensi administrasi), *individual rights* (hak-hak individu), *political responsiveness* (responsif politik), dan *social equity* (keadilan sosial). Keempat aspek di atas menekankan pada bagaimana dan apa seharusnya yang menjadi nilai utama administrasi publik dalam merespons tantangan yang dihadapinya. Keadilan sosial, merupakan sebuah nilai yang dimunculkan kembali dan dianggap baru berkenaan dengan kondisi kehidupan pada saat itu, dimana terjadi ketimpangan, ketidak-adilan, tertutupnya ruang partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan negara dan berbagai kondisi lain yang menunjukkan ketidak-adilan. Strategi mengedepankan nilai keadilan sosial dalam mengatasi masalah ketika itulah sehingga memunculkan perspektif baru dalam administrasi negara yang dinamakan “*New Public Administration*”.

Perubahan peran administrasi publik akan selalu seiring dengan dinamika masyarakat dimana sistem administrasi negara itu berada. Sehubungan dengan hal ini perkembangan administrasi publik akan sangat dipengaruhi oleh kondisi

perkembangan tuntutan dan aspirasi dan pelayanan kebutuhan masyarakat yang cenderung selalu dinamis. Keban (2004) menjelaskan bahwa administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknis efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan masyarakatnya. Orientasi administrasi publik pada saat ini mengarah kepada kepentingan dan kekuasaan pada rakyat sehingga lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi kepada kepentingan-kepentingan publik. Besarnya peran dari administrasi publik diharapkan tidak hanya sebagai sebuah eksistensi melainkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan publik.

## **B. Administrasi Pembangunan**

### **1. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Adminisitrasi pembangunan merupakan suatu usaha atau serangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan oleh suatu negara. Negara secara sadar menuju modernitas dalam mewujudkan perkembangan negara. Administrasi pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014) merupakan cara pendekatan yang merupakan bagian dari suatu keseluruhan proses pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang menyeluruh.

Administrasi memberikan suatu jasa (*service*) untuk pembangunan tersebut dan juga menjadi hasil dari pembangunan itu sendiri. Jadi dalam suatu



pembangunan diperlukan adanya administrasi yang cocok dan sepadan, kemudian diharapkan akan menghasilkan administrasi pembangunan yang baik, termasuk para pelaksana administrasi pembangunan. Merencanakan administrasi pembangunan diperlukan beberapa orang atau kelompok untuk melakukan suatu perencanaan sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai. Kinerja suatu administrasi pembangunan dapat berhasil jika masing-masing individu atau kelompok sadar dengan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan di awal.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka administrasi pembangunan menurut Siagian (2005) didefinisikan sebagai “seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara, bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara, bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”. Administrasi pembangunan memiliki peran penting dalam perkembangan di suatu negara. Perkembangan dalam administrasi pembangunan menuju perubahan ke arah yang lebih inovasi, baik bagi aparatur pemerintahan maupun lembaga. Administrasi pembangunan juga memiliki peran aktif dan berkepentingan terhadap pembangunan.

## **2. Fungsi Administrasi Pembangunan**

Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Administrasi

pembangunan mempunyai beberapa fungsi. Menurut Tjokroamdjoyo dalam Listyaningsih (2014) menyatakan bahwa fungsi administrasi pembangunan sebagai berikut:

a. *The Development of Administration*

Penyusunan kebijakan penyempurnaan administrasi negara meliputi:

- 1) Penyempurnaan dan pendayagunaan organisasi bagi pembangunan (organisasi-organisasi pemerintah untuk melakukan pembangunan)
- 2) Pendayagunaan kepegawaian (pengadaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan)
- 3) Pendayagunaan ketatalaksanaan (masalah organisasi dan tata laksana termasuk prosedur dan tata kerja).

b. *The Administration of Devellopement*

Perumusan dan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif, meliputi:

- 1) Admisnitasi perencanaan dan pemograman pembangunan (misal, kemampuan dan mekanisme analisa dan pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran)

Pembangunan akan terus berjalan mengikuti perkembangan zaman.

Beberapa fungsi administrasi yang telah disampaikan, maka sangat terlihat jelas bagaimana peran admistrasi harus selalu ada dalam pembangunan. Kesimpulannya adalah dalam melaksanakan beberapa fungsi adminsitasi pembangunan maka harus diimbangi dengan kesiapan para pelaku perubahan atau *stakeholders* dalam menjalankan proses administrasi. Pada umumnya memiliki tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkembangan sosial ekonomi.

### C. Teori Pilihan Publik

Teori pilihan publik ini awalnya muncul pada tahun 50an. Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Deliarnov (2006), teori pilihan publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah membuat keputusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat (publik). Definisi yang lebih sederhana diberikan oleh Caporaso dan Levine dalam Deliarnov (2006), yang mengartikan pilihan publik sebagai aplikasi metode-metode ekonomi terhadap politik. Teori pilihan publik berusaha untuk mengaplikasikan perangkat analisis ekonomi kedalam proses nonpasar atau politik dibawah formulasi dan implementasi kebijakan publik, dan juga dikembangkan sebagai kritik terhadap campur tangan negara dalam ekonomi pasar. Selain itu Buchanan dalam Rakhbini (2002) mengemukakan bahwa teori pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Intinya pilihan publik adalah “*the economic study of nonmarket decision making*”.

Buchanan dalam Rakhbini (2002) mengulas teori pilihan publik dari dua aspek, yaitu:

1. Catallactics, dipakai sebagai suatu pendekatan ekonomi dan sebagai subjek pencarian dan gambaran perhatian langsung dari proses pertukaran (process of exchange). Para pelaku politik menawarkan berbagai kebijakan publik kepada masyarakat. Pembeli kebijakan publik ini adalah masyarakat pemilih yang akan memilih kebijakan yang benar-benar dapat mewakili kebutuhan mereka.
2. Homo economicus dipakai untuk menjelaskan prespektif pilihan publik yang bersifat inklusif. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia cenderung memaksimalkan manfaat utilitas untuk dirinya karena

dihadapkan pada kelangkaan sumber daya. Dalam pasar politik, politisi sebagai pelaku memaksimalkan kepuasan pribadi yang dimotivasi oleh banyak faktor seperti gaji, reputasi publik, kekuasaan dan ruang untuk mengontrol birokrasi. Sementara para pemilih akan mengontrol suara untuk mendapatkan kebijakan yang diinginkan. Pilihan publik dapat digunakan untuk mempelajari perilaku actor politik maupun pemilih sebagai petunjuk bagi pengambilan keputusan publik dalam penentuan pemilihan kebijakan publik yang paling efektif.

Menurut Buchanan dalam Rakhbini (2002) Pilihan publik bukan sekedar metode dalam arti sempit dan juga bukan alat analisis biasa yang dipakai untuk menjelaskan kejadian atau fenomena sederhana. Pilihan publik adalah sebuah perspektif untuk bidang sosial dan politik yang muncul dari pengembangan dan penerapan perangkat dan metode ilmu ekonomi. Teori pilihan publik ini berguna untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan kolektif dan berbagai fenomena nonpasar.

Menurut Rakhbini (2002) pilihan publik juga dapat digunakan untuk menunjukkan mengapa sebagian kepentingan bisa di agregasikan dan sebagian lainnya lagi tidak. Dengan demikian, pilihan publik sebagai petunjuk bagi pengambil keputusan untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif. Pemerintah, birokrasi, maupun parlemen sesungguhnya sangat berkepentingan untuk dapat menguasai bahwa pendekatan pilihan publik sangat bermanfaat memandu dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Rackbini (2002) mengemukakan bahwa kebijakan publik yang akan diambil tentunya berdasarkan asas pertukaran yang didasari pemikiran rasional. Interaksi

antara penawaran dan permintaan terjadi, dimana politisi dipandang sebagai produsen yang menawarkan cara terbaik untuk mengonsumsi komoditas publik dan masyarakat pemilih sebagai konsumen, yang akan memanfaatkan dan mengonsumsi komoditas publik tersebut. Sekiranya kekuatan permintaan dan penawaran seimbang, maka kebijakan publik yang diambil akan menguntungkan semua pihak. Teori ini mengasumsikan bahwa setiap individu bertindak rasional tanpa mengindahkan kekayaan lembaga, budaya, politik masyarakat yang ada.

Menurut Rakhbini (2002), fungsi dari pilihan publik dalam kebijakan ekonomi adalah:

1. Menunjukkan bagaimana sikap (behavior) yang diinterpretasikan sesuai medium budaya dan ideologi yang ada.
2. Mengiluminasikan kondisi-kondisi keberhasilan tindakan kolektif dan untuk menunjukan mengapa sebagai kepentingan bisa lebih diagregasikan dan sebagian lainnya tidak.
3. Bisa menjadi petunjuk bagi decision maker untuk menentukan pilihan kebijakan yang paling efektif.

#### **D. Desa dan Pembangunan Desa**

##### **1. Pengertian Desa**

Desa adalah suatu yang merupakan komunitas sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau karena dasar kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat istiadat sehingga tercipta ikatan lahir batin yang kuat antara warga satu dengan yang lainnya, dimana dalam kesehariannya pada umumnya warga desa tersebut hidup dari hasil pertanian,

perikanan dan lainnya, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/kota. Istilah desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu deshi yang artinya tanah kelahiran atau nilai tumpah darah. Desa merupakan bentuk dari suatu kesatuan administratif yang terletak diluar kota. Desa dijadikan sebagai tempat berkumpul, beraktivitas dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan masyarakat didalamnya. Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian desa adalah:

Kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemeeintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan negara yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan yang sesuai dengan pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa bukan merupakan satuan perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara lebih luas. Desa memiliki peran dan posisi yang penting bagi kegiatan pembangunan, pada satu sisi pembangunan desa memiliki tujuan sebagai pembangunan nasional. Selain itu pengertian desa menurut Widjaja (2003), desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah yang memiliki kesatuan hukum dimana Kepala Desa yang menjadi penanggungjawab dalam proses Pemerintahannya. Desa juga memiliki wewenang untuk menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan bagi kepentingan penduduknya. Untuk pembangunan desa, masyarakat desa juga menjadi penanggungjawab untuk turut andil dalam setiap proses perubahan desa ke arah yang lebih baik.

## **2. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam pembangunan desa, yakni untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan. Pemerintahan Desa memiliki tugas dan fungsi yang sangat besar dalam pelaksanaan administrasi masyarakat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Setiap desa memiliki aparatur desa yang bertugas menjalankan roda pemerintahan Desa. Pemerintahan desa, kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan yang ada pada desa setempat.



Kewenangan yang dimiliki oleh desa telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 yang isinya meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak adat istiadat desa. Desa mempunyai peran bagi kegiatan pembangunan dalam urusan otonomi daerah. Dalam pemerintahan desa juga ada lembaga lembaga desa baik itu formal maupun nonformal. Lembaga ini dibentuk guna membantu dan memenuhi kebutuhan msyarakat baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, adat dan keamanan. Lembaga formal dalam pemerintahan desa didirikan oleh pemerintah sedangkan lembaga nonformal dibentuk berdasarkan inisiatif dari masyarakat desa. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa.
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
  - 1) Sekretariat desa, merupakan unsur pelayanan atau staf yang diketuai oleh sekretaris desa.
  - 2) Unsur pelaksana teknis, merupakan unsur pembantu kepala desa yang bertugas melaksanakan urusan yang bersifat teknis di lapangan seperti urusan keagamaan, pengairan, dan lain-lain.
  - 3) Unsur kewilayahan, merupakan pembantu kepala desa yang berada di lingkup wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kewenangan pemerintahan pada dasarnya adalah milik pemerintah pusat. Akan tetapi, dengan kebijakan desentralisasi, pemerintahan pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan pada daerah (provinsi dan /atau Kabupaten/Kota). Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan

penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah dilakukan dengan cara *open end arrangement* atau *general competence*. Artinya, pusat menyerahkan kewenangan pemerintahan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan kebutuhan dan prakarsanya sendiri di luar kewenangan yang dimiliki pusat. Kewenangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab III Pasal 19 disebutkan bahwa urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan yang berwujud organisasi desa yang disebut Pemerintah desa terdiri dari Kepala desa dan Perangkat desa. Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan adanya otonomi istimewa yang dimiliki desa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kesimpulannya adalah pemerintah Desa merupakan organisasi desa yang menjalankan roda pemerintahan desa, memberikan layanan dana bantuan kepada masyarakat desa, melakukan perubahan dan perkembangan desa, membantu memberdayakan masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki hak dalam pengambilan keputusan dalam kepentingan desa dengan seadil-adilnya. Pemerintah Desa juga

harus tutur mematuhi setiap peraturan dengan tidak sewenang-wenang dalam memanfaatkan kedudukan yang ada.

### 3. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan wujud dari salah satu adanya otonomi daerah. Menurut Rozaki, et al (2005:19), otonomi desa dinilai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus rumus tangganya dan kepentingan masyarakat setempat. Sering muncul pemahaman bahwa otonomi desa adalah kemandirian desa yang ditopang dengan swadaya dan gotong royong masyarakat setempat untuk membiayai pelaksanaan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Pelimpahan wewenang kepada desa memiliki tujuan, yang oleh Rozaki, et al (2005) mengatakan bahwa tujuan otonomi desa yaitu semakin transparansinya pengelolaan pemerintah desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalannya pembangunan desa. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi ringan dengan adanya otonomi desa. Selain itu otonomi desa akan memberikan ruang gerak bagi desa untuk melakukan suatu pemerintahan dan pembangunan desa.

Kewenangan yang dimiliki desa menjadikan desa memiliki hak untuk membuat suatu perencanaan pembangunan lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan desa lebih berkembang. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah

memberikan dukungan dan kebebasan untuk keberlangsungan otonomi desa, dengan harapan agar desa dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunannya sendiri.

#### 4. Pembangunan Desa

Menurut Adisasmita (2006) Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan pedesaan. Dalam pembangunan desa, Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di daerah pedesaan (Adisasmita, 2006). Istilah pembangunan umumnya dikenal dengan istilah *development*, sekalipun istilah *development* berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut dengan *rural development*.

Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka meingidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya

secara bersama. Ada yang menngartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat (Adisasmita, 2006). Beratha (1991) mengemukakan Pembangunan masyarakat diartikan sebagai suatu proses, metode, program, kelembagaan, dan gerakan yang mencakup:

- 1) Mengikutsertakan masyarakat sebagai basis dalam menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi bersama.
- 2) Mendidik dan melatih masyarakat dalam proses demokrasi untuk mengatasi masalah secara bersama.
- 3) Mengaktifkan kelembagaan serta menyediakan fasilitas untuk transfer teknologi kepada masyarakat.

Menurut Adisasmita (2006) Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa. Oleh karena itu pendekatan utama yang digunakan dalam pembangunan masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan partisipatif yang melibatkan warga masyarakat desa dalam segenap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil-hasilnya.
- b. Pendekatan kemandirian yang menitikberatkan pada kegiatan dan usaha berdasarkan kemandirian lokal.
- c. Pendekatan keterpaduan, yaitu mengarahkan kegiatan pembangunan secara lintas sektor dan lintas daerah ke dalam suatu proses pembangunan yang menyeluruh dan terpadu.

## 5. Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip: a) transparansi (terbuka); b) partisipatif; c) dapat dinikmati masyarakat; d) dapat

dipertanggungjawabkan (akuntabilitas); dan e) berkelanjutan (*sustainable*). Pembangunan itu pada dasarnya dari, oleh, dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu melibatkan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi.

Adisasmita (2006) mengemukakan Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga optimalitas.

Tiga prinsip pokok pembangunan desa:

1. Kebijaksanaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor dan antar sektor di setiap daerah, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2. Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan.
3. Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulas, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

## 6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Adisasmita (2006) mengemukakan, pada dasarnya tujuan umum dari pembangunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat, dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*). Sedangkan sasaran umum dari pembangunan desa adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis sumberdaya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil. Menurut Adisasmita (2006) sasaran umum tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa sasaran khusus berikut:

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah.
- b) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- c) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.



## **E. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Dalam upaya tersebut meliputi berbagai aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan hidup. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus dilakukan dengan tetap memperkuat potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan, dibangun dari sumber daya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, serta dilaksanakan secara keberlanjutan (Mardikanto dan Soebiato, 2017). Pada hakikatnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan hal yang baru.

Usaha pengembangan masyarakat berorientasi pada partisipasi pembangunan dalam konteks transformasi sosial. Elliot dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) berpendapat bahwa ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang lebih memusatkan pada pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana alam, dll; tanpa bermaksud untuk memberdayakan masyarakat keluar dari kemiskinan rakyat dan ketidakberdayaan mereka dalam proses dan kegiatan politik.
2. Pendekatan pembangunan (*development approach*), yang memadatkan perhatiannya kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan, pemandirian dan keswadayaan.
3. Pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*), yang memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan (yang merupakan penyebab ketidakberdayaan) sebagai akibat proses politik. Pendekatan ini dilakukan melalui program-program pelatihan pemberdayaan masyarakat untuk segera terlepas dari ketidakberdayaan mereka.

Konsep pemberdayaan merupakan model pembangunan yang menitik beratkan pada sektor-sektor produksi, berkaitan dengan hal itu Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa lahirnya konsep pemberdayaan sebagai model antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat konsep ini dibangun sebagai kerangka logic sebagai berikut:

1. Proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi
2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pinggiran
3. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau suatu sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hokum, dan sistem ideology yang memanipulasi untuk memeperkuat legitimasi
4. Pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideology secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tua daya. Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Berdasarkan hal tersebut pemberdayaan masyarakat yang dimaksud atas pemaparan diatas yaitu menitik beratkan pembangunan pada sektor-sektor produksinya terutama pada sumber daya manusia sebagai pelaku utama. Berkaitan dengan hal itu Parsons et al, dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan menekankan masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatian. Sehingga pemberdayaan yang dimaksud dengan hal itu adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pendapat lain dikemukakan oleh *World Bank* dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat miskin untuk mampu dan berani bersuara (*choice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang baik bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Penjelasan tersebut maka pemberdayaan dititik beratkan kepada peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Selain itu Sulistiyani (2004:7) maka menjelaskan pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dan proses pemberian daya,

kekuatan, dan kemampuan dari pihak yang dimiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sedangkan Kartasmita (1996) menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering and sustainable*”. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) atau menyediakan mekanisme mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini hanya dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif-alternatif terhadap konsep pertumbuhan di masa lalu.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk mengubah masyarakat atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri dalam berbagai aspek.

## **2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya memiliki arah dan tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan memerlukan rencana dan kegiatan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah

membentuk inividu dan masyarakat yang mandiri. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Mardikanto dan Soebiato (2017) bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan hal tersebut Mardikanto dan Soebiato (2017) mengemukakan tujuan pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan, antara lain:

- a. Perbaikan pendidikan dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak tertata pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- b. Perbaikan aksesibilitas adalah dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan, lembaga pemasaran
- c. Perbaikan tindakan artinya dengan berbekali kebaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik
- d. Perbaikan kelembagaan adalah dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- e. Perbaikan pendapatan adalah dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapat keluarga dan masyarakatnya.
- f. Perbaikan lingkungan adalah dengan perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas

- g. Perbaikan kehidupan adalah dengan tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

Selain itu, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Dengan kata lain prinsip dasar pemberdayaan memiliki tujuan untuk tercapainya dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri.

### **3. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pemberdayaan menekankan rangkaian-rangkaian kegiatan dalam pemberdayaan dapat berjalan dengan baik hingga proses tersebut mencapai arah dan tujuan. Pendapat lain dikemukakan oleh kartasasmita (1996), mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada manusia atau masyarakat yang tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.



- b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, mengharuskan untuk mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat.

Dengan demikian, proses pemberdayaan yang dimaksud adalah harus dilakukan secara berkesinambungan, terarah dan melibatkan semua potensi yang ada. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui tahap penyadaran, tahap transformasi dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, yang dimulai dari pemberdayaan individu dan kemudian pemberdayaan kelompok, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang berdaya. Masyarakat yang berdaya tentunya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan.

#### **4. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya tentu perlu dilandasi dengan strategi tertentu demi keberhasilannya. Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) strategi pemberdayaan masyarakat pada dasarnya mempunyai tiga arah, yakni: pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat; kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat; ketiga, modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk kesehatan di dalamnya),



budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat. Suharto dalam Mardikanto dan Soebiato (2017) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek pemberdayaan yang dapat dilakukan melalui lima strategi pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yakni:

- a. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu mebebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau sehat antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominisasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Selain itu Mardikanto dan Soebiato (2017) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemetaan wilayah pemberdayaan yang akan dilayani, khususnya pemetaan wilayah berdasarkan keragaman keadaan ekologi masyarakatnya.
- b. Upaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik yang berkaitan dengan kategori masyarakat berdasarkan keinovatifannya, kemampuannya menyediakan sumberdaya, jenis kelamin, dan umurnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengembangan rekomendasi teknologi tepat guna

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat harus memperhatikan batasan guna perlindungan dari kegiatan pemberdayaan yang nantinya berguna untuk tercapainya keinginan dari pemberdayaan, selain itu juga memperhatikan pemetaan pemberdayaan yang berguna untuk memudahkan dalam menentukan wilayah yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## **5. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat dari yang kurang berdaya menjadi lebih berdaya. Pada pemberdayaan masyarakat terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan agar upaya dalam pemberdayaan dapat berjalan dengan maksimal dan menjadikan masyarakat lebih berdaya. Tahap-tahap yang dijelaskan oleh Sulistiyani (2004) sebagai berikut:

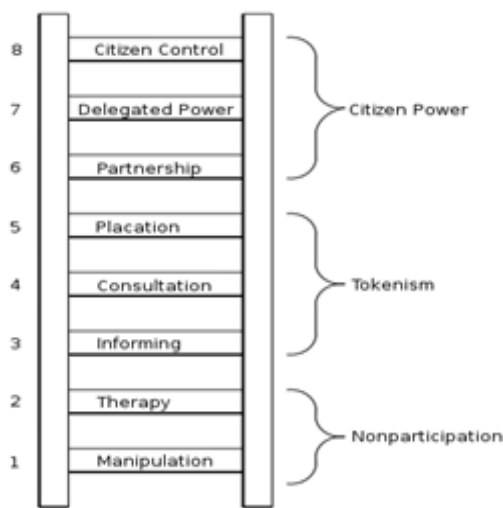
- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas. Tahap ini merupakan suatu tahap persiapan dalam proses memberdayakan masyarakat khususnya kepada masyarakat pedesaan, dimana akan tercipta pra kondisi agar

- dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- b. Tahap transformasi kemampuan yang berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan wawasan terbuka dan bisa memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Pada tahap ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan berlangsung baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi dengan baik. Keterbukaan wawasan muai Nampak dan menguasai kecekapan keterampilan dasar yang dibutuhkan. Tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, yaitu sekedar pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.
  - c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian ini dapat berupa inovatif, kreasi oleh masyarakat. Dalam tahapan ini pemerintah hanya menjadi fasilitator karena masyarakat sudah dapat mandiri dalam membangun usahanya dengan baik.

Pada tahap tersebut antara pemerintah dengan masyarakat saling bersinergi untuk menciptakan pembangunan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan sejahtera, yang membawa rakyat mempunyai kekuatan dalam memandirikan dirinya sendiri, pemerintah sebagai fasilitator harus berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Partisipasi dan pemberdayaan merupakan dua buah konsep yang saling berkaitan.

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat diperlukan upaya berupa pemberdayaan. Masyarakat yang dikenal “tidak berdaya” perlu untuk dibuat “berdaya” dengan menggunakan berbagai model pemberdayaan. Dengan proses pemberdayaan ini diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat. Partisipasi yang lemah dapat disebabkan oleh kekurangan kapasitas dalam masyarakat

tersebut, sehingga peningkatan kapasitas perlu dilakukan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan ditentukan melalui tahapan partisipasi publik yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) dengan mengilustrasikan tahapan partisipasi publik dalam 8 anak tangga yang dapat dilihat pada gambar ini.



**Gambar 1. The Ladder of Citizen Participation**

Sumber: Sherry R. Arnstein, 1969

- a. *Nonparticipation* (Tidak Ada Partisipasi) berjenjang dari *Manipulation* dan *Therapy*. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. Di level *Manipulation*, mereka memilih dan mendidik sejumlah orang sebagai wakil dari publik. Fungsinya, ketika mereka mengajukan berbagai program, maka para wakil publik tadi harus selalu menyetujuinya. Sedangkan publik sama sekali tidak diberitahu tentang hal tersebut. Pada level *Therapy*, mereka sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan.
- b. *Tokenism* (Delusif) berjenjang dari *Informing*, *Consultation* dan *Placation*. Dalam *Tokenism*, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Kenyataannya

berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Ketika berada di level *Informing*, mereka menginformasikan berbagai program yang akan dan sudah dilaksanakan. Namun hanya dikomunikasikan searah, publik belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung. Untuk level *Consultation*, pada tahap ini terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di desa, saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada di pemerintahan desa. Lalu pada level *Placation*, mereka berjanji melakukan berbagai saran dan kritik dari publik. Namun mereka diam-diam menjalankan rencananya semula.

- c. *Citizen Power* (Publik Berdaya). Saat partisipasi publik telah mencapai *Citizen Power*, maka otoritas yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal. Saat tiba di level *Partnership*, mereka memperlakukan publik selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik. Naik ke level *Delegated Power*, mereka mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada publik. Contoh, publik punya hak veto dalam proses pengambilan keputusan. Level tertinggi yaitu *Citizen Control*. Publik yang lebih mendominasi ketimbang mereka. Bahkan sampai dengan mengevaluasi kinerja mereka.

Pemberdayaan yang memiliki arti sangat luas tersebut memberikan keleluasaan dalam pemahaman dan juga pemilihan model pelaksanaannya sehingga variasi di tingkat lokalitas sangat mungkin terjadi. Konsep partisipasi dalam pembangunan di Indonesia mempunyai tantangan yang sangat besar. Model pembangunan yang telah kita jalani selama ini tidak memberikan kesempatan pada lahirnya partisipasi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya “membangkitkan partisipasi” masyarakat tersebut, dengan cara memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat akan berpartisipasi secara langsung terhadap pembangunan.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian serta untuk melakukan pendekatan dengan objek. Penelitian terhadap adanya suatu fenomena yang terjadi di masyarakat, peneliti dapat memilih satu alternatif dari berbagai macam metode penelitian yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan kualitatif yang digunakan, penulis menggunakan metode yang biasanya dimanfaatkan adalah dengan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Metode penelitian deskriptif digunakan penulis dalam penemuan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian dapat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan untuk memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan. Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian karena merupakan salah satu unsur vital untuk memperoleh gambaran menyeluruh dalam menjelaskan aspek-aspek yang rentan dari fenomena yang diamati dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pemilihan metode ini didasari bahwasannya metode ilmiah yang dianggap paling tepat untuk menjangkau, menjelaskan, dan menggambarkan berbagai permasalahan dan data yang ada dengan lebih mendalam

yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu dalam rangka mengetahui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sepaso Selatan.

Creswell dalam Herdiansyah (2010) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan cara menyajikan gambaran menyeluruh, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Moleong (2007) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Suatu penelitian yang melihat makna, penalaran, serta definisi pada suatu situasi yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan pengamatan, selanjutnya peneliti melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang merupakan hubungan antar gejala dengan memberikan gambaran dan analisis secara mendalam terkait Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sepaso Selatan. Penggunaan metode penelitian deskriptif ditujukan untuk lebih menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sepaso Selatan. Penelitian deskriptif yang digunakan mengarah pada data yang kemudian diolah menjadi kata-kata, serta hasilnya berupa sajian atau kutipan-kutipan dan kemudian disusun menjadi sebuah bentuk tulisan yang bersifat sistematis.



## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian, karena fokus penelitian berguna untuk membatasi studi bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian didasarkan atas objek penelitian yang ingin diketahui yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintegrasi secara sinergis. Adanya penentuan fokus penelitian dimaksudkan agar objek yang akan diteliti tidak terlalu luas dan hasil penelitian menjadi lebih terarah dan mendalam serta tidak menimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penentuan fokus penelitian secara efektif diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya fokus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau pengalaman yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah maupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2014). Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya membangun desa di Desa Sepaso Selatan yang menjadi fokus adalah:

1. Dinamika pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa Sepaso Selatan yang meliputi :
  - a. Desa dalam merencanakan
  - b. Desa dalam implementasi
  - c. Desa dalam evaluasi
2. Tantangan yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa sepaso selatan yang meliputi :
  - a. Faktor Pendukung

b. Faktor Penghambat

3. Alternatif pemberdayaan masyarakat Desa Sepaso Selatan ke depan

### **C. Lokasi Dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap fenomena yang akan diteliti kemudian melakukan penelitian disana. Sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan dan memperoleh data yang diperlukan. Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini ialah Kabupaten Kutai Timur, yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan situs penelitiannya ialah Desa Sepaso Selatan Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu desa yang masih mengalami ketertinggalan. Alasan peneliti memilih lokasi ditempat tersebut karena peneliti peduli terhadap keadaan yang menarik minat penulis untuk memahami lebih dalam tentang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan desa.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penentuan sumber data dalam penelitian dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang sebisa mungkin relevan dan akurat dengan harapan pembahasan penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber data yang menyangkut pihak-pihak yang akan dijadikan narasumber tentang fenomena yang dijadikan sorotan dalam penelitian. Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian dimana ketika mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan

masalah yang sudah ditetapkan. sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain.

Berdasarkan pernyataan diatas sumber data dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kata-Kata dan Tindakan

Kata-kata maupun tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan data utama. Sumber data utama tersebut dicatat dan dijadikan catatan tertulis maupun dapat pula melalui perekaman video, *tape recorder*, pengambilan foto, atau film. Berbagai data tersebut dapat diperoleh dari *merger* kegiatan mengamati, mendengar, dan bertanya. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilakukan secara sadar dan terarah karena memang telah direncanakan oleh peneliti.

2. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, koran, sumber dari arsip, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi.

3. Foto dan Rekaman

Foto maupun rekaman akan sangat bermanfaat bagi peneliti. Foto dan rekaman dapat dijadikan bukti nyata dalam pelaksanaan penelitian dan data yang dapat diperoleh lebih relevan. Foto digunakan sebagai data atau sebagai pendorong dalam upaya menghasilkan data, dengan kata lain foto dapat digunakan sebagai pelengkap dalam pengambilan data.

#### 4. Data Statistik

Penelitian kualitatif sering pula menggunakan data statistik yang telah tersedi sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya.

Sumber pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari objek penelitian atau narasumber dilapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang diperoleh berupa jawaban langsung atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui proses wawancara. Data primer dapat berupa pendapat-pendapat yang bersifat objektif karena berupa persepsi pribadi yang disampaikan langsung kepada peneliti. Sumber data primer yang digunakan adalah hasil dari wawancara dengan narasumber yaitu:

- a. Kepala Kepala Desa Sepaso Selatan
- b. Sekretaris Desa Sepaso Selatan
- c. Perangkat Desa Sepaso Selatan
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sepaso Selatan
- e. Masyarakat Desa Sepaso Selatan

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder merupakan data yang berupa dari dokumen yaitu berupa dokumentasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian berupa foto, peraturan daerah, peraturan gubernur, jurnal, dan buku literatur yang diperoleh dari suatu

organisasi atau berasal dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengolah data sehingga data yang digunakan didalam penelitian merupakan data yang valid. Data sekunder merupakan data pendukung yang terkait dengan isi serta pembahasan yang diperlukan dalam penelitian. Proses pengumpulan sumber data dalam penelitian harus dilakukan secara relevan agar pembahasan dalam penelitian dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah dokumen atau arsip yang isinya berhubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Profil Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon dalam angka dan lain-lain.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian, karena dalam hal ini semua data yang relevan dikumpulkan dan selanjutnya diolah. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi empat bagian yaitu observasi, *interview*, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Guna memperoleh data penelitian yang relevan dan valid, adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

##### **1. Observasi**

Proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung maupun tidak langsung pada objek penelitian dan pencatatan secara sistematis

terhadap fenomena yang diteliti. Pengamatan langsung atau observasi sebagai alat pengumpulan data yang harus sistematis artinya observasi dan pencatatan dilakukan dengan prosedur dan aturan-aturan tertentu untuk dikaji ulang oleh peneliti (Nasution, 2007). Peneliti mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dengan cara melakukan observasi terhadap objek-objek yang diteliti dilapangan sehingga diharapkan dapat melihat langsung keadaan nyata yang terjadi dari objek yang diteliti. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian terhadap objek, perilaku subjek, interaksi subjek dengan peneliti serta hal-hal yang relevan sehingga dapat memberikan data tambahan. Observasi dilakukan peneliti untuk memperhatikan fenomena dilapangan untuk menunjang relevansi antara data yang ada dengan kenyataan sesungguhnya dilapangan. Selain itu pengamatan dilakukan untuk melihat secara langsung keadaan nyata objek yang diteliti dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat Desa Sepaso Selatan.

## **2. Wawancara**

Merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang dengan berbicara secara langsung dengan narasumber yang berada di lapangan untuk dimintai keterangan. Melalui wawancara peneliti akan memperoleh informasi mengenai hal yang diteliti. Informasi yang diperoleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yaitu:

- a. Peneliti melakukan wawancara di Kantor Desa Sepaso Selatan dengan narasumber Kepala Desa Sepaso Selatan
- b. Peneliti melakukan wawancara di Kantor Desa Sepaso Selatan dengan narasumber Sekertaris Desa Sepaso Selatan
- c. Peneliti melakukan wawancara di Kantor Desa Sepaso Selatan dengan narasumber perangkat Desa Sepaso Selatan bidang Kasi Kesejahteraan
- d. Peneliti melakukan wawancara di Kantor Desa Sepaso Selatan dengan narasumber anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sepaso Selatan
- e. Peneliti melakukan wawancara di rumah warga Desa Sepaso Selatan dengan narasumber masyarakat Desa Sepaso Selatan

### **3. Dokumentasi**

mengumpulkan data yang berasal dari arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mempelajari catatan-catatan, dokumen-dokumen atau arsip-arsip serta media massa yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi diharapkan peneliti dapat memperoleh data berupa buku, catatan, notulen, agenda, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan memberikan gambaran kondisi empiris lapangan untuk kemudian dijadikan data sekunder sehingga dapat melengkapi berbagai data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara.



## F. Instrumen Penelitian

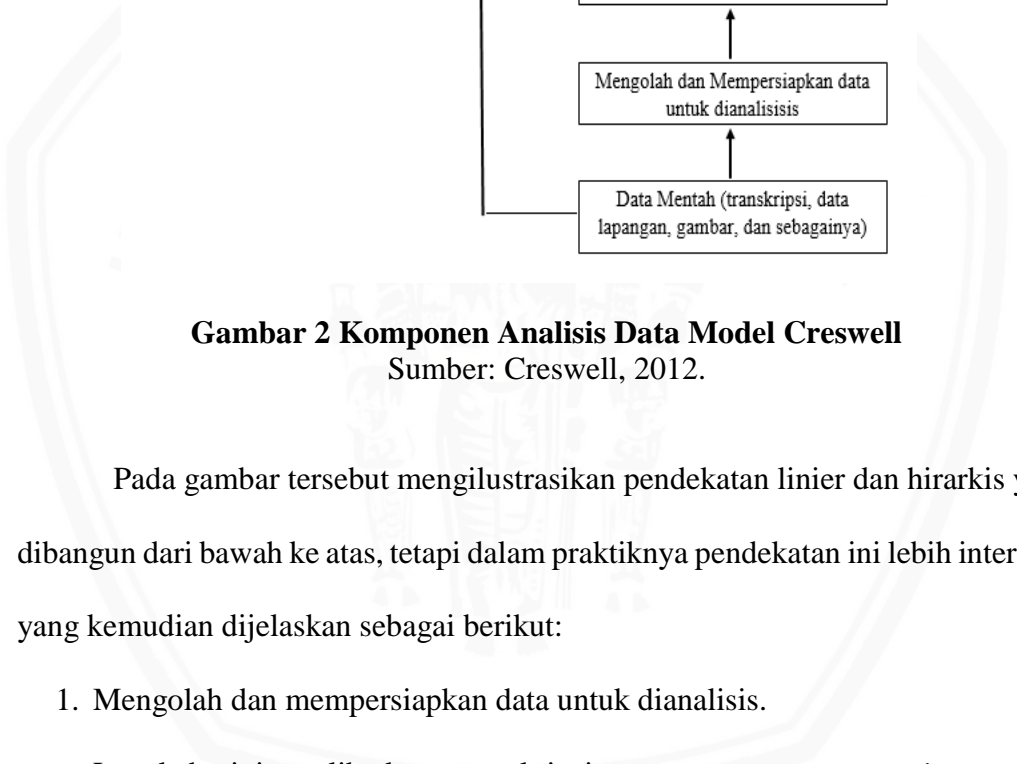
Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data dalam sebuah penelitian. Instrumen penelitian juga sebagai alat bantu penelitian yang sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang akan diperoleh dan dianalisis. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, artinya peneliti sebagai instrumen pengamat yang melakukan pengamatan, mencatat fenomena, objek yang terjadi, dengan dibekali peta, pengetahuan, serta penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti. Ketika fokus penelitian telah ditetapkan, selanjutnya akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan kemudian membandingkan dengan hasil data yang ditemukan melalui observasi dan wawancara dengan cara terjun langsung dilapangan yakni mulai dari *grand tour question*, pada tahap *focused and selection*, pengumpulan data, analisis, menafsirkan data hingga membuat sebuah kesimpulan atas temuan yang diperoleh.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) yakni sebagai pedoman dalam melakukan wawancara dengan narasumber (sumber data primer) untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara diharapkan ketika peneliti terjun ke lapangan dapat lebih fokus dan terarah. Instrumen pedoman wawancara ini berupa pertanyaan yang disusun oleh peneliti dan diajukan kepada informan sehingga dapat memudahkan dan mengarahkan wawancara agar sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

3. Buku catatan lapangan yakni merupakan instrumen sebagai media untuk mencatat informasi yang didapat selama penelitian.
4. Alat perekam digunakan untuk merekam ungkapan yang dikemukakan oleh informan. Hasil rekaman kemudian ditranskripsikan melalui pencatatan sehingga memudahkan untuk mengelompokkan data.
5. Kamera *digital* atau kamera *handphone* digunakan untuk mengambil gambar yang terkait dengan aktivitas saat penelitian berlangsung.

#### **G. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis data yaitu dengan menggunakan model analisis data Creswell. Hal ini dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yakni peneliti melakukan penelitian di lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan informan. Creswell (2012) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat penelitian. Analisis data untuk data-data bersifat kualitatif dilakukan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata yang didasarkan pada pernyataan pernyataan umum, dan informasi dari partisipan. Komponen-komponen analisis dalam model ini digambarkan dan dengan tujuan sebagai berikut:



Sumber: Creswell, 2012.

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.  
Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda-beda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data  
Langkah ini membangun *sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini peneliti menulis

- ## 2. Membaca keseluruhan data

Langkah ini membangun *sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Pada tahap ini peneliti menulis

catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

### 3. Mengcoding data

*Coding* merupakan proses mengolah materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap; mengambil data tulisan atau gambar yang dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengsegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf) atau gambar tersebut kedalam kategori kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang seringkali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar bersaal dari partisipan.

### 4. Tema dan deskripsi

Tahap ini peneliti melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi dan peristiwa dalam *setting* tertentu.

### 5. Menghubungkan tema dan deskripsi

Tahap ini menunjukan bagaimana deskripsi tema akan disajikan kedalam laporan penelitian sebagaimana peneliti lakukan dalam menganalisis data.

### 6. Menginterpretasikan tema dan deskripsi

Tahap ini menginterpretasi atau memkanai data. Dalam hal ini peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Pemaknaan ini bisa berdasarkan pertanyaan yang muncul dari data dan analisis dan bukan dari hasil ramalan peneliti.

Penulis menggunakan analisis Creswell dalam penelitian ini karena pola analisis ini memungkinkan adanya langkah yang lebih fleksibel seperti gambar yang sudah dijelaskan sebelumnya. Peneliti dapat melakukan analisis data kemudian membagi sesuai tema yang telah ditentukan pada fokus penelitian kemudian dapat dilakukan pendeskripsian ataupun penjelasan mengenai tema tersebut sehingga menghasilkan data hasil.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Timur

###### a. Sejarah Singkat Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sangatta. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang pemekaran wilayah Propinsi dan Kabupaten yang diresmikan oleh Mendagri pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara administrasi memiliki luas 3.574.745 km<sup>2</sup> (17%) dari wilayah Kalimantan Timur. Sejak berdiri menjadi Kabupaten, Kutai Timur memiliki lambang kabupaten yang menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan, serta menjadi filosofi dasar.

Sebagai wilayah yang dibangun dengan semangat pemekaran daerah menuju rakyat lebih sejahtera., tentunya lambang Kutai Timur memiliki makna dan arti. Makna dan arti pada lambang daerah Kabupaten Kutai Timur adalah:



**Gambar 3. Lambang Kabupaten Kutai Timur**

Sumber: Profil Kutai Timur, 2015

Keterangan warna dari lambang daerah yaitu:

- 1) Warna Hijau: Kemakmuran, Kesuburan
- 2) Warna Kuning Emas: Keluruhan, Keagungan
- 3) Warna Kuning: Kejayaan
- 4) Warna Merah: Keberanian
- 5) Warna Putih: Kesucian
- 6) Warna Hitam: Kesungguhan

Lambang daerah Kabupaten Kutai Timur mengandung makna sebagai berikut:

- 1) Perisai Bersudut Lima: Melambangkan alat pelindung untuk mencapai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila.



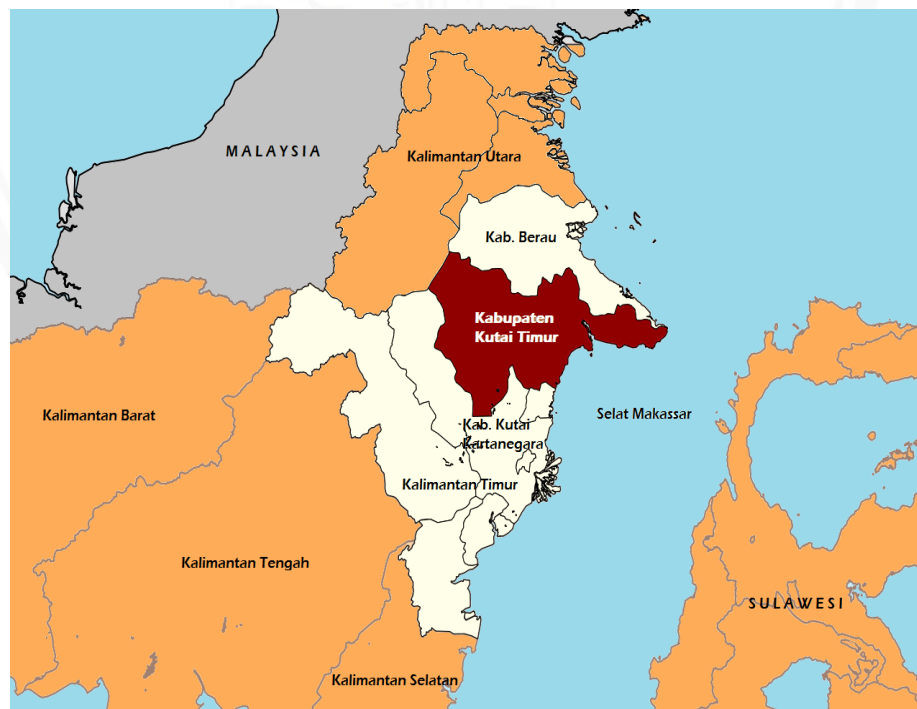
- 2) Bintang Bersudut Lima: Melambangkan Ketuhanan dan Pancasila sebagai Falsafah Negara Republik Indonesia
- 3) Rantai: Melambangkan Pemersatu antara seluruh aparatur dan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
- 4) Dua Belas buah Kapas: Melambangkan tanggal 12 (dua belas) yang merupakan Hari Jadi Kabupaten Kutai Timur.
- 5) Sepuluh buah Gigi Roda Pabrik: Melambangkan bulan Oktober yang menjadi bulan Penetapan Kabupaten Kutai Timur.
- 6) Lima buah Api Menyala: Melambangkan 5 (lima) Kecamatan yang merupakan Cikal Bakal Kabupaten Kutai Timur.
- 7) Tiga Lembar Daun: Mengandung arti bahwa Kabupaten Kutai Timur adalah daerah yang subur.
- 8) Setumpuk Bahan Tambang: Melambangkan Kandungan Bahan Tambang di Kabupaten Timur sangat berlimpah.
- 9) Matahari Terbit: Mengandung arti Kabupaten merupakan daerah yang cerah untuk masa yang akan datang lambang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia digambarkan dengan 17 bunga kapas, 8 daun kapas dan 45 butir padi.
- 10) Sembilan butir Padi pada tangkai kiri dan Sembilan butir padi pada tangkai kanan: Melambangkan Tahun 1999 tahun Penetapan Kabupaten Kutai Timur.

11) Kelian, Tombak serta Mandau: Melambangkan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur siap melaksanakan dan mengamankan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Kalimat “TUAH BUMI UNTUNG BENUA”: Melambangkan arti bahwa “Bumi/daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki Buah dan sekaligus membawa Keberuntungan bagi Kabupaten Kutai Timur”.

#### **b. Kondisi Geografis**

Secara geografis Kabupaten Kutai Timur letaknya berada pada 115°56'26" – 118°58'19" Bujur Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan-1°52'39" Lintang Utara. 115°5'26"-118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan – 1°52'39" Lintang Utara.



**Gambar 4. Peta Kabupaten Kutai Timur**  
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, 2015

Berdasarkan posisi diatas, maka Kabupaten Kutai Timur berbatasan dengan 2 kabupaten dan kota lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang. Selain berbatasan dengan wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur juga dianugerahi dengan berbatasan langsung dengan lautan. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Talisayan dan Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau)
- 2) Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Bontang Utara (Kota Bontang) dan Kecamatan Marang Kayu (Kabupaten Kutai Kartanegara)
- 3) Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi
- 4) Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan Tabang (Kabupaten Kutai Kartanegara)

Kondisi ini merupakan modal awal yang baik bagi pembangunan di Kutai Timur. Bila dilihat lebih jauh maka akibat dari kondisi geografis ini maka Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi yang cukup strategis bagi perekonomian karena posisi ini mendukung interaksi wilayah-wilayah desa/kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, tidak hanya dalam skala provinsi akan tetapi nasional bahkan internasional. Potensi dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan (Kota Orde II) –

Tanjung Redeb ke Samarinda (Kota Orde I – Ibu Kota Provinsi) – Balikpapan (Kota Orde I) – Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan kedalam Kabupaten Kutai Timur.

- 2) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai sekitar 200 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi dan juga bagian Laut Kalimantan Timur yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Suatu daerah dengan wilayah yang luas harus dilihat sebagai potensi bukan sebagai hambatan banyak yang bisa dilakukan dengan wilayah yang luas tersebut. Kabupaten Kutai Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, yang meliputi 5 kecamatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 kecamatan, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 133 desa. Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km<sup>2</sup> atau sekitar 24% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Luas setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur**

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas	
		Desa	Kelurahan	km <sup>2</sup>	%
1	Muara Ancalong	8		2.739,30	7,66
2	Busang	6		3.721,62	10,41
3	Long Mesangat	7		526,98	1,47
4	Muara Wahau	10		5.724,32	16,01
5	Telen	7		3.129,61	8,75
6	Kombeng	7		581,27	1,63
7	Muara Bengkal	7		1.522,80	4,26
8	Batu Ampar	6		204,50	0,57
9	Sangata Utara	3	1	1.262,59	3,53
10	Bengalon	11		3.196,24	8,94
11	Teluk Pandan	6		831,00	2,32
12	Rantau Pulung	8		1.660,85	4,65
13	Sangata Selatan	3	1	143,82	0,40
14	Kaliorang	7		3.322,58	9,29
15	Sangkulirang	15		438,91	1,25
16	Sandaran	7		3.419,30	9,57
17	Kaubun	8		257,45	0,72
18	Karangan	7		3.064,36	8,57
Kabupaten Kutai Timur		133	2	35.747,50	100,00

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021

### c. Demografi

Penduduk berperan ganda dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek merangkap objek pembangunan itu sendiri. Oleh karenanya jumlah dan komposisi penduduk harus diketahui sehingga pemerataan hasil pembangunan bisa dengan tepat diformulasikan. Berdasarkan data tahun 2015, hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Kutai Timur Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebesar 413.508 jiwa. Dari total ini hampir sepertiganya (30,91%) berada di Kecamatan Sangatta Utara. Kemudian jumlah penduduk terbanyak selanjutnya sebesar 9,38% tinggal di Kecamatan Bengalon, 8,32% di Kecamatan Sangatta Selatan, 7,34% berada di Kecamatan Muara Wahau, dan 5,53% tinggal di Kecamatan Kongbeng. Sedangkan 13 kecamatan lain, jumlah penduduknya masing-masing tidak sampai 5% dari total jumlah penduduk Kutai Timur.

**Tabel 4. Persebaran Jumlah Penduduk pada Setiap Kecamatan**

No	Kecamatan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Muara Ancalong	16.922	18.926	18.853	15.470	13.157
2.	Busang	6.973	8.008	7.866	6.066	5.520
3.	Long Mesangat	8.343	9.690	9.811	7.399	7.235
4.	Muara Wahau	26.474	32.347	37.136	26.624	30.344
5.	Telen	10.365	12.814	12.980	9.706	10.057
6.	Kombeng	19.220	28.085	31.334	25.184	22.866
7.	Muara Bengkal	18.175	21.962	21.202	16.604	16.698
8.	Batu Ampar	6.897	7.961	7.851	5.924	6.076
9.	Sangatta Utara	144.176	168.036	175.179	130.268	127.817
10.	Bengalon	28.258	49.703	52.821	39.221	38.789
11.	Teluk Pandan	22.415	28.379	30.291	18.754	17.209
12.	Rantau Pulung	10.094	12.014	12.574	9.104	10.083
13.	Sangatta Selatan	39.125	43.553	44.164	33.403	34.403
14.	Kaliorang	14.389	16.928	17.605	13.056	13.466
15.	Sangkulirang	10.059	13.978	15.875	12.595	14.686
16.	Sandaran	23.391	25.754	26.859	20.560	20.508
17.	Kaubun	15.493	17.775	18.909	13.067	13.464
18.	Karangan	10.096	11.810	13.441	9.693	11.130
	Jumlah	430.865	527.723	554.751	412.698	413.508

Sumber: Rancangan RPJMD Kutim Tahun 2016-2021

Persebaran tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan angka 554.751, pada tahun 2012 dengan angka 527.723, pada tahun 2011 dengan angka 430.865, pada tahun 2015 dengan angka 413.508, dan pada tahun 2014 dengan angka 412.698. Persebaran penduduk yang mengalami fluktuasi seperti ini tentunya berdampak pada kemajuan Kabupaten Kutai Timur.

#### d. Sosial Ekonomi

Untuk kondisi sosial dalam hal keagamaan, pemenuhan tempat ibadah sudah mencukupi, yakni:

**Tabel 5. Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan**

	Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Mushola</i>	Gereja Protestan <i>Christian Church</i>	Gereja Katholik <i>Catholic Church</i>	Pura <i>Temple</i>	Vihara <i>Vihara</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Ancalong	10	8	7	4	-	-
2	Busang	4	4	7	4	-	-
3	Long Mesangat	14	10	13	2	2	-
4	Muara Wahau	34	48	15	9	-	-
5	Telen	5	1	7	2	-	-
6	Kongbeng	34	39	20	3	5	-
7	Muara Bengkal	7	8	1	3	-	-
8	Batu Ampar	13	5	5	3	-	-
9	Sanggata Utara	71	63	33	4	3	-
10	Bengalon	54	37	23	4	-	-
11	Teluk Pandan	44	21	5	2	-	-
12	Sanggata Selatan	31	11	6	3	-	-
13	Rantau Pulung	17	31	6	4	3	-
14	Sangkulirang	19	7	4	4	-	-
15	Kaliorang	25	20	4	3	4	-
16	Sandaran	18	8	2	2	-	-
17	Kaubun	26	30	5	3	6	-
18	Karangan	24	18	3	3	-	-
	<b>Kutai Timur</b>	<b>450</b>	<b>369</b>	<b>166</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>-</b>

Sumber: BPS Kutai Timur, 2015



Kabupaten Kutai Timur menggolongkan penduduk miskin adalah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu yang tingkat pendapatannya kurang dari USD 1,00 perkapita perhari dan konsumsinya berada dibawah garis konsumsi minimum yaitu 2.100 kkal/per kapita/hari (Profil Kutim, 2015). Jumlah penduduk miskin pada 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 sebanyak 24.295 jiwa, tahun 2012 sebanyak 27.200 jiwa dan tahun 2013 sebanyak 27.610 jiwa, serta tahun 2014 sebanyak 27.763 dengan presentase berturut-turut sebesar 6,12%, 9,06%, 8,86% dan 8,67%. Dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 6. Jumlah penduduk dan Presentasi Penduduk Miskin**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Penduduk Miskin(%)	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)
1.	2011	27.432	6,37	93,63
2.	2012	24.295	6,12	93,88
3.	2013	27.200	9,06	90,94
4.	2014	27.610	8,86	91,14
5.	2015	27.763	8,67	91,33

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2016

Terjadi fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 27.432 jiwa, sempat menurun pada tahun 2012 sehingga berjumlah 24.295. setelah tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur terus mengalami peningkatan, dari 27.200 pada tahun 2013 meningkat menjadi 27.763 pada tahun 2015.

#### e. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur 2006-2025

##### VISI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Seperti yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021 dijelaskan bahwa Visi Kabupaten Kutai Timur adalah “Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal menuju Kemandirian Daerah”. Penjabaran terhadap rekomendasi visi tersebut antara lain :

- 1) Terwujudnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing artinya daerah memiliki beberapa komoditas unggulan yang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi baik ditingkat regional, nasional, maupun global.
- 2) Bertumpu pada Pemanfaatan Sumber Daya Lokal, memberikan arti mampu mengelola potensi sumber daya lokal (SDA dan SDM) secara cepat (bijaksana, lestari dan berkelanjutan) merupakan jaminan terhadap keberlanjutan kegiatan pembangunan serta bagi kehidupan generasi sekarang dan akan datang.
- 3) Membangun kemandirian daerah memberikan makna bahwa Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah mandiri (*independent region*) memiliki kemampuan sendiri atau tidak memiliki ketergantungan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

- 4) Kemandirian daerah bukan hanya terbatas pada kemandirian keuangan pemerintah daerah namun meliputi semua komponen pelakunya termasuk masyarakat luas dan dunia usaha.

### **MISI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur masa depan ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat/SDM yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) Mewujudkan perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, berwawasan kebangsaan dan berbasis pengetahuan.
- 3) Mewujudkan pengembangan wilayah dalam konteks kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi disparitas antar wilayah dan sektor pembangunan.
- 4) Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor *economic base* yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan hasilnya serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing.
- 5) Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang aman, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai IPTEK.

## 2. Gambaran Umum Desa Sepaso Selatan

### a. Sejarah Singkat Desa Sepaso Selatan

Wilayah Sepaso Selatan mulai dihuni pada era 60-an. Sebelumnya warga lokal tinggal di sekitar muara sungai, kemudian pindah secara bertahap, hingga ke lokasi sekarang ini. Terbentuknya Desa Sepaso Selatan pada dasarnya tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Kutai dan Sejarah Bengalon. Kata Bengalon sendiri berasal dari Bahasa India Bungalow yang artinya rumah. Namun karena dialek masyarakat lokal yang tidak bisa menyebutkan kata Bungalow dengan benar, maka wilayah ini lebih sering disebut dengan nama Bengalon.

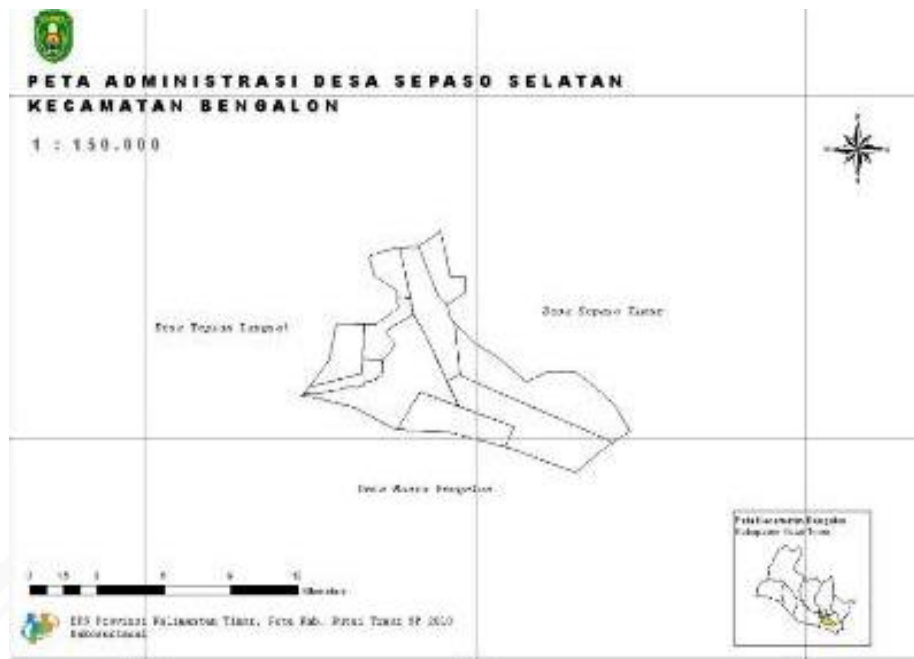
Dulunya, Daerah Bengalon dikenal dengan nama Kampung Sepaso. Sepaso sendiri merupakan tanah sumahan atau tanah sesembahan (jujuran atau mahar) dari Raja Kutai bernama Aji Batara Agung Paduka Nira yang ingin meminang seorang putri bernama Putri Petung. Sepaso sendiri berarti  $\frac{3}{4}$  kaleng tugalan yang artinya luas wilayah yang diberikan adalah seluas  $\frac{3}{4}$  kaleng tugalan. Masyarakat Kampung Sepaso dulunya tinggal di Muara Sungai Bengalon, lalu pindah ke Kampung Gudang Dalam dan sekitar tahun 1969 mulai menetap di Kampung Sepaso, tepatnya di desa yang saat ini menjadi wilayah Desa Sepaso Selatan.

Di masa lalu, Sepaso dipimpin oleh seorang petinggi yang memerintah sampai sekitar tahun 1963. Kemudian sejak tahun 1963 sistem pemerintahan di Kampung Sepaso mengalami perubahan. Mulai dari nama Kampung menjadi Desa, dan petinggi menjadi Kepala Desa. Diawal berdirinya desa,

kepemimpinan masih diteruskan oleh petinggi yang menjabat yaitu Petinggi M.Yusuf atau Kepala Desa M.Yusuf. Lalu pada tahun 1996 kepemimpinannya sebagai kepala desa berakhir dan digantikan oleh anaknya, Ibu Nurhidayah.

Ibu Nurhidayah adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sepaso pada rentang tahun 1996-2004. Pada Tahun 2002 Kepala Desa Sepaso Ibu Nurhidayah melakukan pemekaran Desa Sepaso menjadi 4 yaitu Desa Muara Bengalon, Sepaso Timur, Sepaso Induk, dan Sepaso Selatan. Pemekaran ini dilakukan mengingat Alokasi Dana Desa yang dulunya dikenal dengan nama Bantuan Desa (BANDES) yang diterima oleh Desa Sepaso nilainya sangat kecil, sehingga sangat sulit melakukan pembangunan desa yang memiliki wilayah cukup luas. Desa-desa ini dipersiapkan selama 2 tahun, dan pada tahun 2004 resmi menjadi desa definitif. Setelah dimekarkan, kini wilayah Sepaso Selatan luasnya 25,000,00 Ha.

Masih terhitung luas, tetapi pemukimannya belum merata karena sebagian masih berupa hutan dan sudah menjadi lahan perkebunan sawit. Pada tahun 2004 Desa Sepaso Selatan menjadi desa definitif, dan untuk pertama kalinya melakukan pemilihan Kepala Desa dengan sistem pemilihan langsung. Hal ini tentunya memberi dampak terhadap struktur pemerintahan desanya. Desa Sepaso Selatan merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari 4 dusun dan 10 RT. Kondisi desa Sepaso Selatan dapat digambarkan seperti dibawah ini:



**Gambar 5. Peta Desa Sepaso Selatan**  
Sumber: Arsip Kantor Desa Sepaso Selatan, 2017

#### **b. Kondisi Geografis**

Secara geografis Desa Sepaso Selatan letaknya berada pada Bujur Timur dan Lintang Selatan Lintang Utara. Bujur Timur dan Lintang Selatan Lintang Utara. Berdasarkan posisi diatas, maka Desa Sepaso Selatan berbatasan dengan 1 kota dan 3 desa lain di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Kota Sangatta, Desa Sepaso, Desa Tepian Langsat dan Desa Muara Bengalon. Lokasi Desa Sepaso Selatan tidak jauh dari ibukota Kabupaten Kutai Timur. Desa Sepaso Selatan terletak di dataran rendah dan dekat dengan bantaran sungai sepasso.

Sehingga untuk mencapai desa ini cukup sulit, dikarenakan hanya berupa jembatan gantung dan ponton (kapal penyebrangan) yang dapat digunakan untuk menjangkau wilayah ini. Lingkungan alam Desa Sepaso

Selatan dikelilingi dengan kawasan pertanian terutama tanaman padi sawah dan tanaman lain berupa kelapa sawit. Desa Sepaso Selatan memiliki luas wilayah desa adalah 25,000,00 Ha, dimana lahan yang ada telah digunakan sebagai berikut :

**Tabel 7. Penggunaan Lahan**

No	Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)
1.	Tanah Sawah	150,00
2.	Tanah Kering	57,60
3.	Tanah Basah	0,00
4.	Tanah Perkebunan	5.050,00
5.	Fasilitas Umum	5,85
6.	Tanah Hutan	0,00
7.	Total Luas Tanah	5.264,45

Sumber : Profil Desa dan Kelurahan, 2017

Tanah sawah 150,00 Ha, Tanah kering 57,60 Ha, Tanah Perkebunan 5,050,00 Ha dan Fasilitas umum 5,85 Ha.

### **c. Demografi**

Menurut Data Profil Desa Sepaso Selatan pada tahun 2017 total jumlah penduduk desa adalah 1955 Jiwa, dengan komposisi 1131 adalah laki-laki dan 824 adalah perempuan.

**Tabel 8. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1	TK	-
2	SD	740 orang
3	SMP	493 orang
4	SMA	246 orang
5	Akademi	2 orang
6	Sarjana	2 orang

Sumber: Profil Desa Dan Kelurahan, 2017



Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan TK 0 orang, SD 740 orang, SMP 493 Orang, SMA 246 orang, akademi (D1-D3) 2 orang, Sarjana (S1-S3) 2 orang.

#### **d. Pendidikan**

Kualitas pendidikan tidak terlepas dari sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, sebagai penunjang proses belajar mengajar. Di daerah pedesaan kesadaran masyarakat akan hal Pendidikan merupakan bentuk pembelajaran, pengetahuan, ketrampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, yang dilakukan di bawah bimbingan orang lain maupun otodidak, sehingga menciptakan kualitas pendidikan yang baik untuk masa kini dan yang akan datang.

Namun, tingginya kesadaran masyarakat desa akan pendidikan tidak diimbangi dengan keadaan prasarana pendidikan di desa. Hal ini dibuktikan dengan masih terbatasnya jumlah prasarana pendidikan seperti lembaga pendidikan dan gedung sekolah. Selain itu, sarana pendidikan pendidikan seperti buku-buku, sarana belajar elektronik, kursi dan meja belajar masih terbatas.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di desa menyebabkan sebagian masyarakat desa untuk menyekolahkan anak-anaknya ke luar desa. Seiring dengan terjadinya pembangunan, kondisi pendidikan di Desa Sepaso Selatan diharapkan mengalami peningkatan, dengan dibangunnya prasarana pendidikan mulai dari jenjang TK sampai kepada jenjang SMA.

#### e. Kondisi Sosial Ekonomi

Untuk kondisi sosial dalam hal keagamaan sudah mencukupi, yakni terdapat 5 masjid dan 1 mushola. Di desa Sepaso Selatan dapat terlihat jumlah penduduk menurut agama, yakni:

**Tabel 9. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama**

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	1.925
2	KRISTEN	25
3	KATOLIK	5
4	HINDU	-
5	BUDHA	-

Sumber: Profil Desa Dan Kelurahan, 2017

Penduduk beragama Islam sebanyak 1.925 orang, penduduk beragama Kristen sebanyak 25 orang, penduduk Katolik sebanyak 5 orang, penduduk beragama Hindu sebanyak 0 orang, dan penduduk beragama Budha sebanyak 0 orang. Penduduk yang mayoritas beragama islam tetap memiliki toleransi yang tinggi satu dengan yang lain. Dilihat dari kondisi perekonomian, komposisi pekerjaan penduduk desa dapat dilihat dari table berikut ini:

**Tabel 10. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencanharian**

No	Mata Pencanharian	Jumlah
1	PNS/ABRI	-
2	Swasta	334 orang
3	Wiraswasta/Pedagang	132 orang
4	Petani	664 orang
5	Buruh Tani	10 orang

Sumber: Profil Desa Dan Kelurahan, 2017

Sementara itu dari angkatan kerja yang ada sebagian besar bekerja sebagai petani yaitu 664 orang, swasta 334 orang, wiraswasta 132 orang, buruh tani 10 orang dan PNS/ABRI 0 orang.

#### f. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Sepaso Selatan adalah prasarana pertanian, pendidikan, perhubungan darat, perhubungan perairan, transportasi, pemerintahan desa, sosial dan prasarana umum. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia adalah 2 Sekolah dasar (SD).

**Tabel 11. Prasarana Pendidikan Desa**

No.	Jenis Pendidikan	Negeri			Swasta		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
1	TK	-	-	-	-	-	-
2	SD	2	23	435	-	-	-
3	SMP	-	-	-	-	-	-
4	SMA	-	-	-	-	-	-
5	Akademi	-	-	-	-	-	-
6	Sekolah Tinggi	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	15	190	-	-	-

Sumber: Profil Desa Sepaso Selatan, 2017

Sarana dan prasarana perhubungan darat adalah jalan aspal 11 Km. Sarana dan prasarana perhubungan laut adalah jembatan gantung dan ponton. Sarana dan prasarana transportasi adalah kendaraan umum roda 4 dan sepeda motor. Untuk sarana dan prasarana pemerintahan desa memiliki gedung kantor desa dan balai desa. Tersedia peralatan berupa meja, kursi, telepon, ruang kerja kepala desa, ruang kerja sekretaris desa, mesin tik, lemari arsip, computer, mesin fax, penerangan listrik, toilet dan kendaraan dinas.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Dinamika Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di desa Sepaso**

#### **Selatan yang meliputi:**

Memaknai dinamika pemberdayaan masyarakat terhadap pemberian dana desa yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan agar suatu desa tersebut dapat berkembang baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya. Pemberdayaan merupakan dampak yang ditimbulkan apabila pemerintah telah melaksanakan kegiatan dengan tepat sasaran. Meninjau sebagai salah satu indikator pengelompokan desa yang tertinggal ataupun bisa dikatakan berkembang. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam melihat pembangunan desa yakni berdasarkan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD). Indeks ini menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melihat pada lima dimensi yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut yang menjadi acuan dalam melihat pembangunan desa di Sepaso selatan, IPD yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki kategori tertinggal diantara desa lainnya. Data tersebut disampaikan oleh Bapak Ismail dalam wawancara berikut:

“Begini mas, dari data Badan Pemberdayaan Masyarakat itu memang daerah kita ini merupakan desa yang sejak pengkategorian awal 2014 hingga 2017 belum beranjak dari tertinggal. Kondisi ini dapat mas rasakan sendiri begitu melihat kondisi desa ya, begitu melihat langsung beranggapan yang sama pasti kan.” (wawancara dengan bapak Ismail, Sekertaris Desa, 7 Februari 2018)

Pihak dari pemerintah desa setuju dengan kondisi yang dialami dengan pemberian kategori tersebut memiliki ketepatan dalam pengkategorianya. Desa Sepaso Selatan merupakan salah satu desa tertinggal dari tiga desa lainnya di Bengalon yang total memiliki sebelas desa. Desa Sepaso Selatan diantara desa tertinggalannya memiliki ketertinggalan yang paling tinggi dari dua desa lainnya. Ketertinggalan itu juga ditambah dengan dibatasinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran yang telah disediakan. Kondisi anggaran yang defisit juga menjadi problematika selanjutnya. Anggaran yang defisit tersebut menimbulkan pemangkasan kegiatan yang dilaksanakan pada Desa Sepaso Selatan. Hal ini dikatan oleh Bapak Ismail sebagai berikut:

“Jadi anggaran kita tuh dibatasi mas gabisa melaksanakan kegiatan yang membutuhkan dana besar. Selama ini kita mengalami defisit besar jadi bukan ditambah jumlahnya malah diperkecil dengan dalih efisiensi anggaran. Padahal kalo diliat kondisi sekarang memiliki kebutuhan paling tidak buat mengatasi banjir ini.” (wawancara dengan bapak Ismail, Sekertaris Desa, 7 Februari 2018)

Meninjau pernyataan dari Bapak Ismail, keterbatasan tersebut mendukung adanya pembenahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi. Hal ini diperlukan sebagai desa untuk beranjak dari ketertinggalan yang ada. Ditengah keterbatasan tersebut dimanfaatkan oleh aparatur desa untuk mengganti kegiatan yang ada, mensiasati agar setidaknya aparatur mengetahui kesalahan dalam mengelola kegiatan yang akan dilakukan seperti yang dikatakan pada Bapak Ismail:

“Mungkin kita belum profesional dalam mengelola kegiatannya, jadi kita berinisiatif agar pengelolaan ini kita bertanggung jawabkan

dengan baik. Supaya desa ini bisa mengerti pengelolaannya jadi pemberdayaannya juga harus pada kelembagaannya juga.” (wawancara dengan bapak Ismail, Sekertaris Desa, 7 Februari 2018).

Dapat disimpulkan bahwa desa Sepaso Selatan merupakan salah satu desa tertinggal dari tiga desa lainnya di Bengalon yang total memiliki sebelas desa. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam melihat pembangunan desa yakni berdasarkan pada Indeks Pembangunan Desa (IPD). Indeks ini menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melihat pada lima dimensi yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum, serta penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut menjadi acuan dan menjadi tolak ukur untuk mengkategorikan ketertinggalan diantara desa lainnya. Ketertinggalan itu juga ditambah dengan. Kondisi anggaran yang defisit juga menjadi problematika selanjutnya. Anggaran yang defisit tersebut menimbulkan pemangkasan kegiatan yang dilaksanakan pada Desa Sepaso Selatan. Dengan kondisi keterbatasan tersebut mendukung adanya pembenahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi.

#### **a. Cara desa dalam merencanakan**

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan. Serangkaian proses perencanaan dimaksudkan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh desa atau masyarakat desa untuk dipenuhi oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat tentunya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk mensukseskan agenda

pembangunan. Partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan juga sangat diperlukan, agar supaya program yang dilaksanakan di desa merupakan program yang memang dibutuhkan dan diinginkan oleh desa. Berikut ini pernyataan dari Bapak Atim:

“Ya kalau merencanakan kita ikut terlibat. Mulai musyawarah di tingkat RT dulu sih, apa aja yang kita pingin sama butuh ya itu yang kita usulkan ke RT. Terus pas di desa juga ada. Usulan yang di RT itu disampaikan ke Desa pas Musrenbangdes. Tapi pas musrenbangdes tidak semua warga ikut, ya paling RT sama perwakilan tiap RT yang dating. Sampai disitu aja sih mas” (wawancara dengan bapak Atim, warga desa, 10 Februari 2018)

Di Desa Sepaso Selatan sebelum menyusun perencanaan di desa terlebih dahulu melakukan musyawarah di tingkat RT. Hal ini bertujuan menampung apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa. Setelah itu dilakukanlah musyawarah di tingkat desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Musrenbangdes menjadi hal penting dalam tahap perencanaan, karena dalam Musrenbangdes masyarakat diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan desa. Musrenbangdes menjadi wadah menjangkau aspirasi masyarakat terhadap desa salah satunya dalam wujud pembangunan. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk turut memberikan usulan apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ismail:

“Musyawarah diadakan di tingkat RT, kemudian diseraplah keinginan dari tiap RT itu apa saja, jadi masyarakat ingin pembangunan apa ya diajukan di musyawarah tingkat RT. Kemudian setelah tingkat RT dilakukan di tingkat desa yakni Musrenbangdes, jadi bagaimana pemerintah desa menyaring permohonan dari masyarakat, yang nantinya akan disaring lg, sesuai



atau tidak dengan yang menjadi permasalahan dan dibutuhkan desa. Dari musyawarah ini maka akan menghasilkan apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat desa dan menjadi rencana untuk 1 tahun kedepan. Kemudian dari musrenbangdes dimasukan juga ke dalam RPJMDes. Dari hasil RPJMDes tersebut dapat kita tentukan mana yang menjadi acuan dalam hal pembangunan. Dalam perencanaannya masyarakat mengajukan pilihan namun tetap desa yang memutuskan. karena kita sendiri takut kalau diserahkan semua ke masyarakat akan tidak tepat sasaran, dan manfaatnya hanya beberapa tahun saja. Kita ingin manfaatnya berkelanjutan” (wawancara dengan bapak Ismail, sekertaris desa, 7 Februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam proses perencanaan Desa Sepaso Selatan masyarakat tentunya ikut terlibat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan awal yakni musyawarah di tingkat RT. Masyarakat diberikan keleluasaan dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya dari aspirasi masyarakat yang di kumpulkan di tingkat RT kemudian dilakukan kembali musyawarah di tingkat desa melalui Musrenbangdes.



**Gambar 6. Kegiatan Musrenbang**  
Sumber: Bagian Umum Kantor Desa Sepaso Selatan

Musrenbangdes menjadi wadah menjangkau aspirasi masyarakat terhadap desa salah satunya dalam wujud pembangunan. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk turut memberikan usulan apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan desa, namun keputusan akhir ada pada pemerintah desa. Pemerintah desa memutuskan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan desa.

#### **b. Cara desa dalam implementasi**

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, seperti pelaksanaan dalam pembangunan sarana prasarana turut melibatkan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam melaksanakan pekerjaan dengan berkontribusi baik dengan tenaga maupun dengan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaannya ya dikatakan penonton juga bisa, dikatakan membantu juga bisa. Ya kita ambil contoh, membangun pos kamling atau ponton penyebrangan, kan otomatis membutuhkan tukang. Bisa juga dikatakan membantu lewat tenaga dan dana. Kemudian tukangya ya berasal dari penduduk setempat juga. Dalam tahap melaksanakan usulan yang telah direncanakan masyarakat tidak semuanya kami kerjakan, tentunya juga kita lebih selektif lagi, yang mana menjadi prioritas, itulah yang kami kerjakan. Karena ya itu tadi, kita tidak mau sia-sia dalam membangun di desa ini, kita mau apa yang kita rencanakan dan kemudian kita laksanakan akan berdampak terus menerus bagi masyarakat. Kita tidak mau kalau sampe setahun atau 2 tahun saja, ya jadi percuma kan akhirnya. Lebih baik kan kita membuat terus melakukan perawatan, daripada membuat, terus rusak akhirnya membuat lagi, jadi ya sia-sia saja” (wawancara dengan Bapak Ismail, sekretaris desa, 7 Februari 2018).

Dari hasil wawancara diatas, tahap pelaksanaan dapat dikatakan sebagai tahapan proses pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat Desa Sepaso Selatan ikut berkontribusi melalui pembangunan

sarana prasarana, seperti membangun pos kamling atau ponton penyebrangan baik dengan tenaga maupun dengan dana. Berikut kondisi hasil pembangunan berupa pos kamling dan ponton penyebrangan:



**Gambar 7. Kondisi Pos Kamling dan Ponton Penyebrangan**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Namun terkait dengan tahap perencanaan, bahwa usulan perencanaan yang telah dibuat masyarakat tidak semuanya dilaksanakan. Sumber daya manusia yang kurang, serta menginginkan pembangunan berkelanjutan merupakan alasan kurangnya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pendamping masyarakat, yakni pemerintah. Sehingga sesuatu yang telah direncanakan dengan baik melenceng dalam pelaksanaan di lapangan.

### **c. Cara desa dalam evaluasi**

Evaluasi sebagai proses pengawasan yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membentuk suatu sistem untuk pengawasan secara internal untuk jangka panjang. Evaluasi bertujuan apakah program itu mampu atau tidak

mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai. Di Desa Sepaso Selatan, evaluasi dilakukan setelah program telah berjalan setidaknya dalam satu tahun, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku sekertaris desa mengatakan bahwa:

“Kalau untuk evaluasi ya hanya dari desa sebatas laporan pertanggungjawaban (LPJ), contohnya tahun 2017 penggunaan dana untuk pembangunan sekian juta, untuk pemberdayaan sekian. Ya kalo itu setiap tahun dilakukan pas sebelum RKPDes, nah terus kan ada pelaporan, dilibatkan BPD, perwakilan beberapa warga di setiap RT, sama tokoh masyarakat, kalo untuk ukuran penilaian tidak ada di seluruh desa. Kalo penilaian secara tertulis tidak ada, hanya sebatas omongan sih adanya. Ya rata-rata laporan pertanggung jawaban untuk tiap RT, misalnya RT ini telah dibangun jalan, sudah terlaksana berapa meter, jadi dilaporkan kendala selama pembangunan apa, kemudian masyarakat menanggapi. Ya hanya sebatas itu saja, selebihnya tidak ada” (wawancara dengan Bapak Ismail, sekertaris desa, 7 Februari 2018).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi di Desa Sepaso Selatan hanya sebatas laporan pertanggung jawaban yang dilakukan setiap tahun. Pada saat pelaksanaan laporan pertanggung jawaban turut melibatkan berbagai kalangan mulai dari BPD, perwakilan warga di setiap desa, dan beberapa tokoh masyarakat.

## 2. Tantangan yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa sepaso selatan yang meliputi :

### a. Faktor Pendukung

#### 1) Potensi Wilayah

Desa Sepaso Selatan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bengalon yang memiliki luas 17 km<sup>2</sup> dari 3196.24 km<sup>2</sup>. Berikut data luas wilayah yang terdapat di Kecamatan Bengalon.

**Tabel 12. Luas Wilayah Kecamatan Bengalon**

No	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Sepaso	245.73	7.69%
2	Sepaso Timur	15.24	0.48%
3	Sepaso Selatan	17.00	0.53%
4	Tepian Langsung	836.40	26.17%
5	Tepian Indah	197.00	6.16%
6	Tebangan Lembak	464.00	14.52%
7	Sekerat	879.12	27.50%
8	Muara Bengalon	15.53	0.49%
9	Tepian Baru	150.00	4.69%
10	Keraitan	344.95	10.79%
11	Sepaso Barat	31.27	0.98%
	<b>Total</b>	<b>3196.24</b>	<b>100.00%</b>

Sumber: Kecamatan Bengalon Dalam Angka Tahun 2017

Luas Sepaso Selatan juga mempengaruhi hasil alam yang ada disana. Beberapa luas lahan di Sepaso Selatan diperuntukkan berbagai macam kegunaan. Berikut tabel 13 tentang luas lahan menurut penggunaannya di Kecamatan Bengalon.

**Tabel 13. Luas Lahan Menurut Penggunaannya**

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Sawah	192
2.	Tegalan/Kebun	775



No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
3.	Ladang/Huma	359
4.	Perkebunan	35867
5.	Hutan Rakyat	1250
6.	Hutan Negara	135629
7.	Padang Rumput Gembala	350
8.	Kolam	16
9.	Tambak	215
10.	Rawa	7232
11.	Pemukiman	1359
12.	Lahan Lainnya	134795
	<b>Total</b>	<b>318039</b>

Sumber: Kecamatan Bengalon Dalam Angka Tahun 2017

Peruntukan lahan yang ada di Kecamatan Bengalon menjadikan wilayah di Sepaso Selatan juga memiliki potensi wilayah jika dilihat berdasarkan data diatas. Berbagai jenis penggunaan lahan menjadikan Desa Sepaso Selatan memiliki hasil produksi utama komoditi padi. Berikut hasil produksi Desa Sepaso Selatan yang terlampir pada tabel 14

**Tabel 14. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Padi dan Palawija**

No.	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi Sawah	4	16
2.	Padi Ladang	5	12.5
3.	Jagung	3	6
4.	Kacang Hijau	1	2
5.	Kacang Tanah	1	2
6.	Ubi Jalar	2	28
7.	Ubi Kayu	1	15

Sumber: Dinas Pertanian

Komoditas padi merupakan produksi unggulan desa yang mampu meningkatkan ekonomi desa melalui pertanian. Berikut ini pernyataan dari Bapak Ismail:

“Sumber daya alam di desa ini sangat melimpah berupa pertanian dan pertambangan. Pertanian padi sawah yg menjadi salah satu produk unggulan, sedang kita genjot untuk meningkatkan perekonomian desa, sehingga menjadi pendapat asli desa kita. Dan kita berharap sektor pertanian kita menjadi tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan pangan desa setiap tahunnya. Karena pertanian padi sawah sudah dicanangkan sebagai ketahanan pangan” (wawancara dengan Bapak Ismail, Sekertaris Desa, 7 Februari 2018).

Potensi alam yang melimpah merupakan salah satu faktor yang dimiliki oleh Desa Sepaso Selatan sebagai roda penggerak ekonomi desa melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini pernyataan dari Bapak Sadaruddin:

“Ya untuk di Sepaso Selatan sendiri sumber daya alam cukup melimpah, di Sepaso Selatan sendiri yang gencar ya pertanian padi sawah, karena Sepaso selatan sendiri wilayahnya cukup luas, dan paling banyak digunakan untuk pertanian padi sawah. Dan diharapkan pertanian ini dapat menjadi tulang punggung untuk memenuhi dari segi ekonomi maupun kebutuhan pangan, karena pertanian padi sawah kita ini kan untuk ketahanan pangan nantinya” (wawancara dengan Bapak Sadaruddin, Kepala Desa, 23 Februari 2018).

Pernyataan dari Bapak Sadaruddin juga sesuai dengan pernyataan dari Ibu Indah Yuliana:

Di Sepaso Selatan kalau bicara potensi ya lebih ke pertanian padi. karena Sepaso selatan wilayahnya cukup luas, dan digunakan untuk pertanian padi. Ya selain itu sih ada jagung juga ya mas, tapi tidak sebanyak padi sih. Kita berharap sih padi ini bisa untung buat desa ini, bisa untung dari segi ekonomi bisa juga untung dari segi ketahanan pangan” (wawancara dengan Ibu Indah Yuliana, kasi kesejahteraan, 23 Februari 2018).

Potensi yang melimpah ini akan meningkatkan ekonomi desa apabila mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan porsinya. Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa Sepaso Selatan memiliki potensi



hasil pertanian yang bias dikelola dan dijadikan sebagai komoditi unggulan. Dengan demikian dari hasil pertanian terutama komoditi padi jika dimanfaatkan secara benar maka hasil tersebut mampu menopang perekonomian masyarakat Desa Sepaso Selatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Keterbatasan Dana**

Dana merupakan faktor penting dalam upaya melaksanakan pembangunan. Dapat diketahui bahwa ketersediaan dana dapat mendukung dan menghambat pembangunan. Selain itu, dana merupakan pendukung dari terlaksananya suatu program pembangunan. Di desa Sepaso Selatan, keterbatasan dana menjadi penghambat proses pembangunan. Kondisi keterbatasan dana yang ada di desa Sepaso Selatan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan. Keadaan ini tentunya menjadikan pembangunan terhambat dan desa tidak dapat bersaing dengan desa lainnya. Berikut pernyataan dari Bapak Ismail:

“Tidak ada penghambatnya yg mendasar, kadang yg menghambat itu dana yg diharapkan tidak sesuai. Jadi antara anggaran yang kita inginkan dengan yang diberikan tidak sesuai. Apalagi kabupaten sendiri dari 2016 mengalami defisit anggaran, terjadi pemangkasan anggaran, jadinya ya pengaruh juga kan terhadap pembangunan desa, terlebih lagi pemberdayaan masyarakatnya, karena tidak punya PAD. Nah kemaren ADD nya tersendat, karena juga adanya devisa anggaran kabupaten akhirnya desa lainnya menutup kantornya, artinya belum bisa mandiri karena ketergantungan akan kebutuhan dana. Jadi ya dana berpengaruh sekali untuk pembenahan desa ini, supaya desa ini bisa bersaing dengan desa yang lain” (wawancara dengan bapak Ismail, sekretaris desa, 7 Februari 2018).

Kondisi keterbatasan dana yang ada di desa Sepaso Selatan mempunyai pengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan. Keadaan ini tentunya menjadikan pembangunan terhambat dan desa tidak dapat bersaing dengan desa lainnya. Berikut pernyataan dari Bapak Sadaruddin:

“Memang kami mengalami keterbatasan dana mas, sehingga dana yang tersedia hanya bisa untuk mengcover sedikit dari yang kita rencanakan. untuk kebutuhan dasar yakni pendidikan maupun kesehatan saja kita belum mencukupi, mungkin benar kita dikatakan sebagai desa tertinggal. Ya memang kita memerlukan banyak dana untuk membangun desa ini, apalagi desa kami ini tidak punya PAD, dan lagi kabupaten sedang mengalami devisa anggaran, jadi sangat terasa sekali pengaruhnya. Untuk itu dengan dana yang ada ini kami berupaya mengelolanya sehingga bisa meningkatkan potensi desa kami dan kedepannya dapat menjadi PAD desa kami” (wawancara dengan bapak Sadaruddin, Kepala Desa, 23 Februari 2018).

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa dana merupakan modal pokok dalam melakukan pembangunan. Di Desa Sepaso Selatan, permasalahan dana merupakan masalah utama. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana yang menjadi penghambat proses pembangunan. Sumber dana yang tidak menentu, kondisi kabupaten yang mengalami devisa dan tidak adanya PAD sangat berpengaruh terhadap laju pembangunan yang dilakukan di Desa Sepaso Selatan. Keadaan ini tentunya menjadikan pembangunan terhambat dan desa tidak dapat bersaing dengan desa lainnya.

## 2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan satu elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan komponen utam yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan. Oleh karena itu untuk kelancaran proses pemberdayaan, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-tapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ismail mengatakan bahwa:

”Ya masyarakat disini kalau menghadiri rapat atau musyawarah tidak semuanya ikut, pasti ada yang datang ada juga yang tidak datang. Ya bisa dikatakan ada yang acuh tak acuh. Pada saat musyawarah tingkat RT juga masih ada yang belum berani berpendapat, ngasih saran maupun usulan, masih banyak yang ikut-ikutan, gampang terpengaruh warga disini. Jadi ya kadang orang-orang itu aja yang berpendapat” (wawancara dengan bapak Ismail, sekretaris desa, 7 Februari 2018).

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi di Desa Sepaso Selatan masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat desa yang tidak peduli dan pasrah dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulan secara langsung, sehingga menyebabkan keterlambatan di dalam proses pemberdayaan masyarakat.

## 3) Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat yang lain dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sepaso Selatan yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat

pendidikan penduduk mayoritas yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMA, yang nantinya akan berdampak pada kegiatan tahap perencanaan. Berikut data terkait lulusan Pendidikan yang berpengaruh terhadap kualitas masyarakat Desa Sepaso Selatan.

**Tabel 15. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1	TK	-
2	SD	740 orang
3	SMP	493 orang
4	SMA	246 orang
5	Akademi	2 orang
6	Sarjana	2 orang

Sumber: Profil Desa Dan Kelurahan, 2017

Pada proses perencanaan pada Desa Sepaso Selatan menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri.

Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan untuk pemberdayaan masyarakat. Rendahnya sumber daya manusia juga dilihat di lingkungan aparatur desa. Aparatur desa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menyerap dan memahami materi antara satu dengan yang lainnya, yang dapat dilihat dari beragamnya

tingkat pendidikan, usia dan jumlah personilnya. Berikut pernyataan dari

Bapak Sadaruddin:

“Hambatannya juga dari SDMnya yang kurang, jadi penyerapan materi maupun informasi yang diberikan tidak selalu SDM bisa memahami secara cepat dan tepat, masih ada sebagian yang pemahamannya berjalan secara perlahan” (wawancara dengan Bapak Sadaruddin, Kepala Desa, 23 Februari 2018).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak

Ismail:

“Ya karena tingkat SDM yang beraneka ragam, kemudian hal ini menjadi kendala pokok disini. Contohnya bisa diambil ketika SDM dalam pemerintahan, memiliki permasalahan menyelesaikan administrasi ada yang terlambat, itu kan juga kaitannya dengan SDM, ya karena latar belakang pendidikan, terus masalah usia, dan jumlah personil yang ada, itu juga bisa jadi kendala kita” (wawancara dengan bapak Ismail, sekretaris desa, 7 Februari 2018).

Dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Desa Sepaso Selatan yang masih relatif rendah menjadi salah satu hambatan yang ada. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yaitu karena latar belakang pendidikan, usia maupun jumlah personil yang ada. Akibatnya proses pembangunan maupun pemberdayaan menjadi terhambat.

### **3. Alternatif pemberdayaan masyarakat desa sepaso selatan ke depan meliputi :**

#### **a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**

Alternatif pemberdayaan merupakan kebutuhan setiap daerah apabila daerah mengalami keterhambatan dalam penerapan pemberdayaan masyarakat. Keterhambatan pemberdayaan yang ada bisa berupa

ketidakpahaman masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan maupun ketidakmampuan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa dalam membuat dan menerapkan pemberdayaan yang ada. Desa Sepaso Selatan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada menurut Bapak Ismail memiliki partisipasi yang kurang. Sinergitas antara pemerintah desa, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa sendiri juga dinilai belum terbentuk dengan baik. Hal ini dikarenakan lembaga masyarakat desa yang sejatinya sebagai mitra pemerintah yang berguna sebagai pendorong partisipasi masyarakat belum menunjukkan peran dan fungsi yang semestinya. Pernyataan ini dibenarkan oleh pernyataan dari Bapak Ismail:

“Ya seperti itu tadi mas, partisipasi disini kurang. Pemerintah desa, terus lembaganya, dan masyarakat juga kurang kompak. Dan lagi yang saya liat peran lembaga disini ini itu kurang, padahal ya lembaga kan istilahnya wakil dari masyarakat kan ya. Ya mungkin karena kita belom profesional dalam mengelola hal-hal ini, jadi kita berinisiatif agar pengelolaan ini kita pertanggung jawabkan dengan baik. Supaya desa ini bisa mengerti pengelolaannya, jadi ya pemberdayaannya bukan untuk masyarakat saja, tapi juga harus pada kelembagaannya juga” (wawancara dengan bapak Ismail, sekertaris desa, 7 Februari 2018).

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Sadaruddin:

“Kalau yang saya liat sih peran dan fungsinya kurang ya mas, lebih banyak kayak LPM itu ke administrasinya aja yang jalan, masih pasif kegiatannya, karena yang lebih menonjol disini kan lembaga keliatannya ya LPM aja kan, kalau yang lainnya belum keliatan. Ya karena SDM juga masih rendah, karena tingkat pendidikan, jadi kurang pemahaman soal apa yang terjadi, terus apa yang harus dilakukan belum pada paham gitu” (wawancara dengan bapak Sadaruddin, Kepala Desa, 23 Februari 2018).



Lembaga kemasyarakatan sebagai pendorong partisipasi masyarakat masih belum menunjukkan peran dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu contoh yaitu lemahnya pemahaman LPM akan peran dan fungsinya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran LPM saat ini hanya melakukan kegiatan administratif saja, belum menyentuh mengenai pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai pernyataan dari Ibu Eva:

“Kegiatan LPM sekarang sih ya memang administrasinya aja sih mas. Kita disini bantu tugas pemerintah aja. Kegiatan LPM belum jalan, belum ada program yang kita kerjakan disini. Ya sembari nunggu kantor yang baru jadi, kita masih dalam tahap perencanaan kegiatan sih mas. Itu aja sih masih kegiatan kita.” (wawancara dengan Ibu Eva, anggota LPM, 23 Februari 2018).

Lemahnya peran dan fungsi LPM ini akibat dari kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah. Sehingga upaya untuk memberdayakan masyarakat belum terlaksana akibat dari belum berdayanya lembaga kemasyarakatan desa. Melihat pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa seharusnya memiliki sasaran strategis, yang salah satunya yaitu meningkatkan peran, fungsi dan kapasitas lembaga masyarakat, melalui Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan kapasitas, mendorong inovasi kegiatan, dan mendorong tumbuhnya prestasi kerja Lembaga Kemasyarakatan dalam bidang



pemberdayaan masyarakat, pelayanan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan desa. Dengan begitu upaya membangun desa dari ketertinggalan akan mencapai keberhasilan.

#### **b. Melibatkan pihak ketiga**

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memampukan desa dalam melakukan tindakan bersama sebagai suatu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ditingkat pemerintah desa, masyarakat desa, maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga pihak lain selain pemerintah desa agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan maupun belum direncanakan. Keterlibatan pihak lain bisa menjadi salah satu cara ketika birokrasi mengalami keterhambatan dalam penerapan pemberdayaan masyarakat. Keterhambatan yang ada bisa berupa ketidatersediaan sumber dana yang cukup, Sumber Daya Manusia yang relatif

rendah sehingga tidak memiliki kapasitas, dan partisipasi masyarakat yang rendah karena birokrasi tidak memiliki kapasitas mendorong dalam membuat dan menerapkan pemberdayaan masyarakat. Berikut pernyataan dari Bapak Ismail:

“Menurut saya yang paling terasa menjadi penghambat disini ya yang pertama itu dana yang sangat kurang, karena juga tidak punya PAD, ADD nya juga tersendat, dan lagi kabupaten sendiri mengalami defisit anggaran. Selanjutnya masalah SDM. Bisa dikatakan SDM kita masih relatif rendah ya, karena faktor pendidikan yang belum semuanya lulusan kuliah. Kalau pun S1 juga masih banyak yang belum mengerti bagaimana membangun desa ini, ya intinya belum punya kapasitas yang baik lah. Dan yang terakhir partisipasi masyarakat yang kurang. Ya menurut saya ada hubungannya dengan SDM kami yang kurang, jadi belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan baik” (wawancara dengan bapak Ismail, sekertaris desa, 7 Februari 2018).

Melihat pernyataan diatas bahwa Desa Sepaso Selatan saat ini memiliki hambatan dalam pemberdayaan masyarakat, yakni berupa permasalahan dana yang tidak tersedia, SDM yang rendah serta partisipasi masyarakat yang kurang. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa saat ini belum mampu melakukan sendiri penerapan pemberdayaan masyarakat, sehingga memerlukan kerjasama atau bantuan dari pihak ketiga. Sebenarnya bekerja sama dengan pihak ketiga adalah alternatif jitu dalam mengatasi situasi ini. Pihak ketiga dinilai bisa menjadi seseorang atau sekelompok orang yang akan diajak kerjasama oleh Pemerintah Desa untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa. Cara ini akan dianggap lebih efektif karena diharapkan dapat memberikan saran atau

kegiatan pendukung sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai apa yang menjadi harapan dan juga potensi desa.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Dinamika Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di desa Sepaso Selatan yang meliputi :**

Penggunaan Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan salah satu tolak ukur yang mengelompokkan desa Sepaso Selatan masuk dalam kategori desa tertinggal. Pemerintah desa sepaso selatan tentunya sadar akan kebutuhan pembenahan, yang dilihat pada lima dimensi yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan umum serta peyelenggaraan pemerintah. Proses pembenahan yang dilakukan diharapkan berjalan dengan tepat seiring dengan perubahan waktu, dan akan semakin mendorong adanya profesionalisme inividu maupun lembaga. Proses pembenahan yang terpadu membuka luas peran masyarakat agar lebih partisipatif dan berperan dalam membangun daerahnya.

##### **a. Cara desa dalam merencanakan**

Hasil penelitian dilapangan menyebutkan bahwa pemerintah Desa Sepaso Selatan sebelum menentukan program-program pemberdayaan terlebih dulu membuat perencanaan yang strategis dengan melihat kebutuhan dan keinginan masyarakat desa, serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dengan melibatkan LPMD dan ketua RT dan RW. Setelah itu dilakukanlah musyawarah di tingkat desa melalui

Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Melalui musrenbangdes masyarakat diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam kemajuan desa. Musrenbangdes menjadi wadah menjangking aspirasi masyarakat terhadap desa salah satunya dalam wujud pembangunan. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk turut memberikan usulan apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan desa. Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Arnstein, 1969) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 4, tahap dimana terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di desa, saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada di pemerintahan desa. Dalam proses perencanaan Desa Sepaso Selatan masyarakat tentunya ikut terlibat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan awal yakni musyawarah di tingkat RT. Masyarakat diberikan keleluasaan dalam menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka. Selanjutnya dari aspirasi masyarakat yang di kumpulkan di tingkat RT kemudian dilakukan kembali musyawarah di tingkat desa melalui Musrenbangdes. Musrenbangdes menjadi wadah menjangking aspirasi masyarakat terhadap desa salah satunya dalam wujud pembangunan. Masyarakat desa diberikan kesempatan untuk turut memberikan usulan apa saja yang dibutuhkan untuk kemajuan desa, namun keputusan akhir ada pada pemerintah desa. Pemerintah desa memutuskan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan desa sehingga program pemberdayaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dengan baik.

**b. Cara desa dalam implementasi**

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, seperti pelaksanaan dalam pembangunan sarana prasarana turut melibatkan masyarakat. Masyarakat terlibat dalam melaksanakan pekerjaan dengan berkontribusi baik dengan tenaga maupun dengan dana. Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Arnstein, 1969) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 4, tahap dimana terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di desa, saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada di pemerintahan desa. Dalam hal ini masyarakat Desa Sepaso Selatan ikut berkontribusi melalui pembangunan sarana prasarana, seperti membangun pos kamling atau ponton penyebrangan baik dengan tenaga maupun dengan dana. Namun terkait dengan tahap perencanaan, bahwa usulan perencanaan yang telah dibuat masyarakat tidak semuanya dilaksanakan. Sumber daya manusia yang kurang, serta menginginkan pembangunan berkelanjutan merupakan alasan kurangnya kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pendamping masyarakat, yakni pemerintah. Sehingga sesuatu yang telah direncanakan dengan baik melenceng dalam pelaksanaan di lapangan.

**c. Cara desa dalam evaluasi**

Dalam tahap evaluasi di Desa Sepaso Selatan, pemerintah melakukan evaluasi hanya sebatas laporan pertanggung jawaban yang dilakukan setiap tahun. Pada saat pelaksanaan laporan pertanggung jawaban turut melibatkan

berbagai kalangan mulai dari BPD, perwakilan warga di setiap desa, dan beberapa tokoh masyarakat. Dari penjelasan diatas apabila dikaitkan dengan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh (Arnstein, 1969) maka tahapan tersebut memenuhi tahap 2, dimana pada tahap ini mereka sedikit memberitahu kepada publik tentang beberapa programnya yang sudah disetujui oleh wakil publik. Publik hanya bisa mendengarkan. Dalam hal melakukan evaluasi hanya dijalankan dan diketahui oleh perwakilan masyarakat, yakni RT, RW, tokoh adat, dan tokoh agama. Tidak semua masyarakat mempunyai kesempatan dalam memberikan masukan berupa koreksi atau saran-saran perbaikan. Walaupun masyarakat ingin memberikan saran atau koreksi hanya dilakukan secara tidak langsung, atau disampaikan kepada perwakilan tokoh masyarakat.

Setelah program telah berjalan setidaknya dalam satu tahun, sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan kemudian dilaksanakan.

## **2. Tantangan yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat di desa sepaso selatan yang meliputi :**

### **a. Faktor Pendukung**

#### **1) Potensi Wilayah**

Sumber daya alam merupakan modal utama dalam melakukan pembangunan. Setiap daerah mempunyai sumber daya alam yang berbeda yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan.

Desa merupakan wilayah identik dengan sumber daya alam yang

melimpah. Desa dengan berbagai potensinya dapat dijadikan faktor pendukung dalam pembangunan nasional. Ketersediaan lahan dan kesuburan tanah di desa menjadi faktor produksi utama dalam bidang pertanian. Hal ini dikarenakan masyarakat desa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani.

Di Desa Sepaso Selatan potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan penduduk untuk meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dapat dilihat bahwa penyokong utama sektor ekonomi desa adalah bidang pertanian khususnya padi. Melihat kondisi seperti ini, pemanfaatan potensi yang maksimal dapat memajukan ekonomi suatu wilayah. Dalam memanfaatkan potensi ini tentunya tidak terlepas dari adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di desa. Masyarakat dilatih, dibimbing serta didampingi dalam pemanfaatan potensi desa, sehingga hasilnya akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang terdiri dari air, tanah dan udara dapat dijadikan potensi dalam pembangunan desa tertinggal. Hal ini, dikarenakan ketertinggalan desa tidak berarti desa tersebut tidak memiliki potensinya sama sekali, tetapi karena desa kurang memaksimalkan pengelolaan potensinya tersebut.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Keterbatasan Dana**

Dana merupakan komponen penting dalam upaya pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat. Ketersediaan dana dapat



memengaruhi semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Desa yang identik dengan ketersediaan alam yang melimpah, sebagian besar memiliki daya pengelolaan sumber daya yang kurang maksimal. Sehingga kebanyakan dari desa tidak bisa berkembang adalah karena keterbatasan dana dan akses untuk mendapatkan dana. Di Desa Sepaso Selatan, keterbatasan dana ini telah disampaikan oleh perangkat desa. Hal ini karena pengelolaan yang kurang maksimal terhadap potensi desa sehingga menjadi kendala Desa Sepaso Selatan dalam meningkatkan ekonomi desa. Di sektor pertanian, sistem irigasi, pembuatan embung desa dan pemilihan bibit sangat membutuhkan biaya yang besar. Ditambah lagi saat terjadi banjir maupun kemarau, akan membutuhkan teknologi yang pastinya membutuhkan dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program pembangunan yang telah dibuat relatif banyak, namun dana pembangunan yang ada sangat terbatas.

## **2) Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat merupakan satu elemen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Masyarakat merupakan komponen utam yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan. Oleh karena itu untuk kelancaran proses pemberdayaan, masyarakat selaku dari obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang

tenaga maupun berupa uang atau barang. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu pada saat dilakukan musyawarah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi di Desa Sepaso Selatan masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat desa yang tidak peduli dan pasrah dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulan secara langsung, sehingga menyebabkan keterlambatan di dalam proses pemberdayaan masyarakat.

### **3) Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk mayoritas yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMA. Hal tersebut berdampak pada kegiatan tahap perencanaan. Pada proses perencanaan pada Desa Sepaso Selatan menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan untuk pemberdayaan masyarakat. Rendahnya sumber daya manusia juga dilihat di lingkungan aparaturnya desa. Aparatur desa memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam menyerap dan memahami materi

antara satu dengan yang lainnya, yang dapat dilihat dari beragamnya tingkat pendidikan, usia dan jumlah personilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum berdaya sesuai dengan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh kartasasmita (1996) dijelaskan bahwa masyarakat yang berdaya memiliki pola pikir cosmopolitan, wawasan berfikir luas, seperti mengadopsi inovasi, toleransi tinggi dan menghindari konflik. Untuk itu perlu adanya pengelolaan Sumber Daya Manusia di desa, sehingga memiliki kemampuan berwawasan luas, memiliki inovasi, memiliki toleransi yang tinggi, dan yang dapat menghindari konflik, agar nantinya mampu memahami aturan yang diberikan oleh pusat.

### **3. Alternatif pemberdayaan masyarakat desa sepaso selatan ke depan meliputi :**

#### **a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan**

Guna mewujudkan pembangunan di satu desa maka perlu adanya keterlibatan antara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K), harus dibekali keterampilan dan kapasitas yang cukup. Sehingga mampu menjadi penggerak dalam pembangunan suatu desa. Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya menciptakan

iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, karena lembaga ini secara formal memiliki kekuasaan mengatur dan kepercayaan dari masyarakat sendiri.

Dalam realitanya terdapat isu terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini. Berdasarkan hal di atas, berbagai hal diusahakan berupa penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa. Penyelenggaraan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa yang akan dilakukan meliputi Sosialisasi Program dan Kegiatan, Penguatan Kapasitas

Lembaga, Peningkatan Kapasitas SDM (Capacity Building), Peningkatan Kapasitas Manajemen, Pendampingan, Pengendalian dan Pengawasan.

Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya adat-istadat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu pendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan kapasitas, mendorong inovasi kegiatan, dan mendorong tumbuhnya prestasi kerja Lembaga Kemasyarakatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pelayanan pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan desa.

**b. Melibatkan Pihak Ketiga**

Salah satu alasan utama perlunya pola kemitraan pihak ketiga dengan pemerintah karena berbagai keterbatasan, di mana pemerintah menghadapi keterbatasan baik dana, pengalaman maupun ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyediakan pelayanan tersebut. Pernyataan diatas tentunya sesuai dengan kondisi Desa Sepaso Selatan saat ini, dimana desa memiliki keterbatasan baik dana maupun sumber daya manusia yang kompeten. Keterbatasan ini tentunya memerlukan suatu bentuk alternatif strategi yang dapat berupa kerjasama antara pemerintah desa dengan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam pembangunan daerah akan berpotensi membantu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan pembangunan di daerah. Pelibatan pihak ketiga juga merupakan solusi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah.

Sesuai PP no 43 tahun 2014, pemberdayaan masyarakat desa bisa melibatkan pihak ketiga yang diberi mandat secara jelas untuk melaksanakan pemberdayaan. Dimaksud dengan pihak ketiga, antara lain, adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau Desa. Pihak ketiga dapat mendampingi masyarakat dalam berbagai hal, yakni peningkatan kapasitas, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan masih banyak

aktifitas lain, dilakukan oleh pihak ketiga, guna mendampingi desa. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka membantu desa, karena selama ini desa dipandang sebagai pihak yang lemah. Oleh karena itu desa menjadi obyek yang harus selalu dibantu.

Pihak ketiga yang akan melakukan upaya guna membantu memandirikan desa adalah salah satunya perguruan tinggi/akademisi. Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melakukan penelitian penemuan teknologi tepat guna yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Masyarakat dan mahasiswa secara bersama-sama mendiskusikan masalah, mencari solusi dan membuat keputusan untuk dilaksanakan. Posisi masyarakat dan mahasiswa sejajar dimana saling berkerja sama dari mencari masalah dan potensi desa hingga melaksanakan kegiatan. Mahasiswa akan berperan sebagai fasilitator, dan sementara masyarakat sebagai partisipator dalam program yang dilaksanakan.

Beberapa model kerjasama yang akan dilakukan dapat berupa kegiatan KKN maupun pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi. Karena bagi desa kerjasama ini menguntungkan karena adanya transfer ilmu. Sedangkan bagi perguruan tinggi, ini akan menjadi tambahan kredit poin, yang pada saatnya nanti akan menambah nilai dalam hal akreditasi. Dengan cara yang demikianlah peran serta mahasiswa dalam kehidupan masyarakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.



Dalam bidang yang lain, pihak swasta pun ikut andil. Mereka bisa memberikan bantuan berupa uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung dalam bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas hidup yang lebih baik, bekerjasama dengan masyarakat lokal dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berdiri. Kesadaran perusahaan untuk turut serta dalam program pembangunan melalui kegiatan CSR merupakan peluang untuk mewujudkan pengembangan masyarakat. Adanya CSR menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Lewat CSR secara tidak langsung akan meningkatkan hubungan kemitraan antara swasta dan masyarakat.

Keterlibatan pihak ketiga dinilai bisa menjadi seseorang atau sekelompok orang yang akan diajak kerjasama oleh Pemerintah Desa untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa. Cara ini akan dianggap lebih efektif karena diharapkan dapat memberikan saran atau kegiatan pendukung sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai apa yang menjadi harapan dan juga potensi desa, dan mampu menciptakan masyarakat yang berdaya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab selanjutnya, bahwa dengan melihat kondisi di Desa Sepaso Selatan saat ini jika ditinjau dari teori *Arnstein* masih berada pada level *consultation*. Pada level ini dimana dinamika pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi, telah terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan di desa, semua saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada di pemerintahan desa. Peran publik saat ini hanya dapat memberikan saran maupun kritik. Saran dan kritik yang telah dibuat kemudian ditampung oleh pemerintah desa. Sedangkan pada akhirnya hanya pemerintah desa yang memiliki kekuasaan dalam memilih dan menentukan apa yang akan dilakukan di desa.

Belum terlibatnya masyarakat dalam hal pengambilan keputusan dikarenakan sumber daya manusia yang belum memiliki kapasitas untuk hal tersebut. Sumber daya manusia di Desa Sepaso Selatan mayoritas masih berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan pula ketidaktahuan masyarakat dalam bagaimana mengembangkan desa melalui potensi yang sudah ada. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat juga masih tergolong rendah, dibuktikan dengan rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrenbang, ataupun rapat dalam lingkup RT. Masyarakat lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada mengikuti musyawarah ataupun kegiatan yang ada, selain itu

masyarakat beranggapan bahwa sudah ada pemerintah desa yang bekerja untuk desa dan dapat mencari solusi untuk memajukan desanya.

Permasalahan tersebut tentu saja menghambat desa Sepaso Selatan untuk berkembang, dan masih akan terus berada pada kondisi ketertinggalan. Namun bukannya tidak mungkin kedepannya desa akan menjadi desa yang berdaya. Jika ditinjau ke dalam teori *Arnstein*, bahwa desa Sepaso Selatan sebenarnya bisa berada di level *Partnership*, dimana mereka memperlakukan masyarakat selayaknya rekan kerja. Mereka bermitra dalam merancang dan mengimplementasi aneka kebijakan publik bersama. Namun untuk bisa sampai ke level *Partnership* tentunya butuh pembaruan di dalam proses pemberdayaan masyarakatnya, yaitu melalui alternatif pemberdayaan masyarakat.

Alternatif yang ditawarkan untuk desa Sepaso Selatan yang pertama, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan dilakukan karena lembaga kemasyarakatan sebagai pendorong partisipasi masyarakat masih belum menunjukkan peran dan fungsinya dengan baik. Terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan, mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat, tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun mudarnya adat-istiadat. Untuk itu diperlukan penguatan kembali peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang nantinya mampu pendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan

masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Alternatif yang kedua yakni melalui keterlibatan pihak ketiga, antara lain, adalah perguruan tinggi dan perusahaan. Adapun keterlibatan pihak ketiga disini lebih kepada pola kemitraan atau kerjasama. Beberapa model kerjasama yang akan dilakukan dapat berupa kegiatan KKN maupun pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi. Karena bagi desa kerjasama ini menguntungkan karena adanya transfer ilmu. Dalam bidang yang lain, pihak swasta pun ikut andil. Mereka bisa memberikan bantuan berupa uang dan atau barang yang dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung dalam bentuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pihak ketiga dapat mendampingi masyarakat dalam berbagai hal, yakni peningkatan kapasitas, pendidikan, pembangunan infrastuktur, dan masih banyak aktifitas lain, dilakukan oleh pihak ketiga, guna mendampingi desa. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka membantu desa, karena selama ini desa dipandang sebagai pihak yang lemah. Keterlibatan pihak ketiga dinilai bisa menjadi seseorang atau sekelompok orang yang akan diajak kerjasama oleh Pemerintah Desa untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan desa. Cara ini akan dianggap lebih efektif karena diharapkan dapat memberikan saran atau kegiatan pendukung sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai apa yang menjadi harapan dan juga potensi desa, dan mampu menciptakan masyarakat yang berdaya.

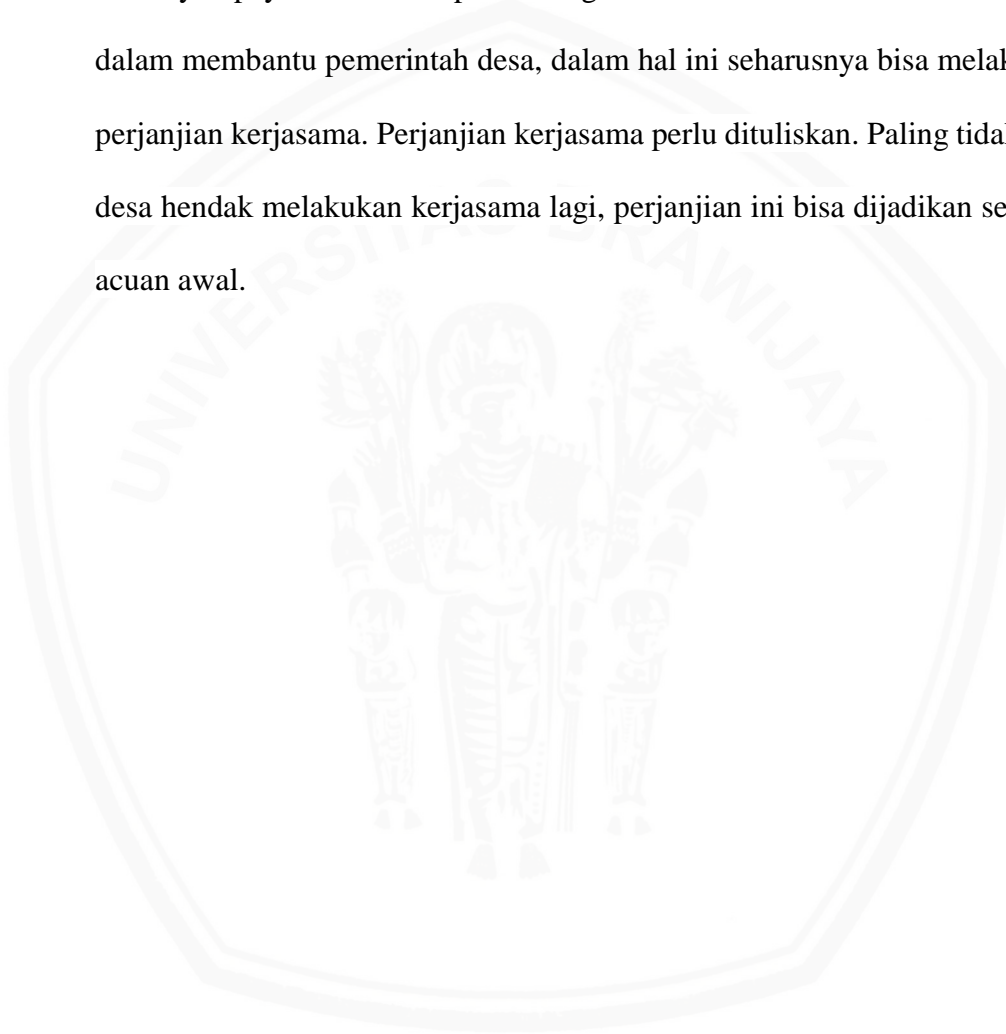
## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan peneliti berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka saran yang dapat dikemukakan peneliti sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan kualitas pemberdayaan masyarakat di desa Sepaso Selatan adalah:

1. Diharapkan kepada masyarakat desa Sepaso Selatan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan mulai dari menentukan dan membuat program, pelaksanaan program hingga membantu mengevaluasi program yang belum dan telah dilaksanakan. Pemerintah desa Sepaso Selatan sebagai aktor kunci pembangunan harus bisa memfasilitasi masyarakat. Pemerintah desa Sepaso Selatan sebaiknya lebih mengoptimalkan program-program pemberdayaan, agar program tersebut bisa terealisasi dengan baik serta menyediakan kotak saran untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan masyarakat yang tidak mau menyampaikan pendapatnya secara langsung yang diletakkan di kantor desa. Selain itu harus ada sinergitas antara pemerintah pusat, kabupaten, kecamatan dan desa.
2. Perlunya upaya pemerintah desa, lembaga masyarakat maupun masyarakat Desa Sepaso Selatan meningkatkan kompetensi atau pengetahuan SDM nya, bisa melalui pelatihan dengan tenaga ahli, kunjungan ke daerah lain, maupun melakukan kerjasama dengan akademisi, sehingga nantinya memiliki kapasitas yang mampu memecahkan persoalan desanya sendiri.
3. Perlunya upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dapat menumbuhkan kembali semangat, serta peran dan fungsi lembaga

kemasyaraatan, sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Perlunya upaya melibatkan pihak ketiga dalam hal ini akademisi dan swasta dalam membantu pemerintah desa, dalam hal ini seharusnya bisa melakukan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama perlu dituliskan. Paling tidak saat desa hendak melakukan kerjasama lagi, perjanjian ini bisa dijadikan sebagai acuan awal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2013. *Pembangunan perdesaan: pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arnstein, Sherry. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of the American Institute of Planners.
- Bappenas. 2013. *Evaluasi PNPM Mandiri*. Accessed November 3, 2017. <https://www.bappenas.go.id/files/ekps/2013/3.Evaluasi%20PNPM%20Mandiri.pdf>.
- . 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014*. Accessed November 2, 2017. [https://www.bappenas.go.id/files/5514/4704/6044/Buku\\_Indeks\\_Pembangunan\\_Desa\\_2014.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/5514/4704/6044/Buku_Indeks_Pembangunan_Desa_2014.pdf).
- Beratha, Nyoman. 1991. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Creswell, John.W. 2012. *RESEARCH DESIGN Pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indrajit. Richardus Eko. 2006. *Ragam Model Bisnis Kemitraan Pemerintah-Swasta: Sebuah Kunci Sukses Pengembangan E-Government di Indonesia*. Aula Barat & Timur Institut Teknologi Bandung: Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- . 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: ITB.
- Keban, T. Yermias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.



- Klingner, Donald E. & Nalbandian, John. 1985. *Public personnel Management: Context and Strategies*. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice Hall Inc
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan - Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Serang: Graha Ilmu.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research: Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Kepala Badan Stastistik Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- PresidenRI. 2015. *Membangun Indonesia Dari Desa*. Accessed Oktober 17, 2017. <http://www.presidentri.go.id/program-prioritas-2/960.html>.
- Rakhbini, Didik.J 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur 2016-2021
- Rozaki, Abdur. et.al. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.
- Siagian, Sondang.P. 2005. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya Edisi Kedua*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

- Simanjuntak, B. dan Pasaribu, I.L. 1986. *Pendidikan dan Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Tarsito.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media Jogja.
- Sumarmi. 2012. *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan*. Malang: Aditya Media Publishing.
- Sunardjo, R.H. Unang. 1984. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Tarsito.
- Tjiptoherjanto, Prijono dan Manurung, M. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

